

BAB III

PEMBAHASAN

Analisis framing bertujuan untuk melihat bagaimana wartawan membuat sebuah *frame* sebuah berita di media massa. Wartawan dan media memiliki kendali atas realitas yang terjadi untuk bagaimana realitas tersebut diterima oleh masyarakat dalam bentuk berita. Pada akhirnya berita yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah berita yang merupakan peristiwa yang sudah dipilih dan sudah diolah kembali oleh wartawan baik secara bahasa, ukuran huruf hingga grafis yang disajikan, pers juga ikut berperan penting dalam setiap penerapannya. Pada bab III ini objek analisis berjumlah 14 Berita, dengan Suara Merdeka sebanyak 5 berita, Kedaulatan Rakyat sebanyak 5 Berita dan Republika sebanyak 4 Berita.

Tabel 3.1 Berita Edisi 30/8/18

No	Suara Merdeka	Kedaulatan Rakyat	Republika
1	Asian Games Yang Menyejukkan : Keakraban Jokowi – Prabowo Contoh Bagi Pendukung		Asian Games Yang Menyejukkan

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 3.2 Berita Edisi 1/9/18

No	Suara Merdeka	Kedaulatan Rakyat	Republika
1	MUI Ajak Umat Santun Bersosmed		

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 3.3 Berita Edisi 2/9/18

No	Suara Merdeka	Kedaulatan Rakyat	Republika
1		Rencana Kegiatan Jalan Sehat Di Solo Ditolak Oleh Sejumlah Elemen Masyarakat	

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 3.4 Berita Edisi 3/9/18

No	Suara Merdeka	Kedaulatan Rakyat	Republika
1			Jokowi: Berpendapat Ada Batasannya

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 3.5 Berita Edisi 4/9/18

No	Suara Merdeka	Kedaulatan Rakyat	Republika
1	Gerakan Tagar Capres Diatur		Polri Terbitkan Arahan Deklarasi

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 3.6 Berita Edisi 6/9/18

No	Suara Merdeka	Kedaulatan Rakyat	Republika
1	Sri Sultan: Merdeka Dan Beradab Itu Saling Menguatkan	'KASUS MALANG' BISA TERULANG Jika Eks Napi Korupsi Jadi Wakil Rakyat	
		Gerak Jalan 'Neno' Di Solo	

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 3.7 Berita Edisi 8/9/18

No	Suara Merdeka	Kedaulatan Rakyat	Republika
1			Sikap Bawaslu Soal Terkait Perang Tagar

Sumber: Olahan Peneliti

A. Analisis Framing Surat Kabar Harian Suara Merdeka

I. Frame : Pro Kontra #2019gantipresiden Tidak Mencerminkan Momen

Keakraban Asian Games

Tabel 3.8 STRUKTUR SINTAKTIS

No	Terbit	Headline (Judul)
1	Kamis, 30 Agustus 2018	Asian Games Sejukkan Suhu Politik Keakraban Jokowi-Prabowo Contoh bagi Pendukung
Lead		
1	Kamis, 30 Agustus 2018	Asian Games benar-benar menjadi momen yang mampu menyatukan dan menyejukkan suhu politik.
Latar Informasi		
1	Kamis, 30 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Momen keakraban pun terjalin antara capres (petahan) Joko Widodo dan capres penantang Prabowo Subianto pada ajang final silat. Keakraban itu tergambar dalam momen berpelukkan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat merayakan kemenangan pesilat Hanifan Yudani Kusumah. Momen ini sanggup melelehkan seluruh rakyat. • Keakraban dan suasana cair antara Presiden Jokowi dan Prabowo yang akan bersaing dalam Pilpres itu menjadi angin segar yang mampu meredakan ketegangan politik antar pendukung akhir-akhir ini, terutama tentang pro dan kontra aksi deklarasi #2019gantipresiden. Momen ini tentu menjadi penanda untuk menyudahi benturan antar pendukung demi kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan nasional. Harapan untuk politik sehat, damai pun muncul dari kedua belah pihak.
Kutipan, Sumber, Pernyataan		

1	Kamis, 30 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> • “Saya mengucapkan terima kasih, yang kedua juga ingin memberikan selamat kepada teman baik saya, sahabat saya, Pak Prabowo Subianto yang mengomandani. Beliau adalah Ketua IPSI, sehingga kita tahu semuanya, kita mendapatkan emas dari cabang olahraga pecak silat ini 14, sehingga total sekarang ini kita mendapatkan emas 30. Saya kira ini semuanya untuk Indonesia, untuk negara, untuk rakyat semuanya,” ujar Jokowi di arena silat kompleks TMII, Rabu (29/8). • “Saya atas nama masyarakat pencak silat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, dan Ibu Presiden Indonesia. Bayangkan semua hadir di sini, disaat kritis ini, membangkitkan semangat masyarakat pencak silat. Kita bangga bisa berperan, bisa berbuat yang baik untuk negara dan bangsa. Kalau sudah untuk negara dan bangsa kita bersatu, tidak ada perbedaan,” tandasnya.
Penutup		
1	Kamis, 30 Agustus 2018	Presidium Pimpinan Pusat KMHDI Putu Wiratnaya menyatakan organisasinya tidak malu memberi apresiasi kepada Presiden Jokowi yang banyak melakukan perubahan, termasuk pembangunan infrastruktur karena berdampak pada pengganguran angka kemiskinan. “Kami berharap setelah pembangunan fisik, pemerintah wajib membangun sumber daya manusia,” katanya.

Frame yang digunakan dalam berita kali ini adalah bagaimana gerakan #2019gantipresiden yang banyak mendapatkan reaksi pro dan kontra yang akhirnya timbul benturan antar pendukung tersebut seakan tidak mencerminkan keakraban yang terjadi di Asian Games yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Prabowo.

Frame tersebut jelas mengajak aksi pro dan kontra terhadap gerakan

#2019gantipresiden untuk ikut larut dalam keakraban yang terjadi dan segera mengakhiri setiap benturan antar pendukung yang terjadi.

Headline yang dipakai oleh surat kabar harian Suara Merdeka yaitu “Asian Games Sejukkan Suhu Politik”. Judul yang disajikan oleh Suara Merdeka pada 30 Agustus 2018 memberikan gambaran mengenai suasana yang terjadi ketika Asian Games yang akhirnya dapat mencairkan suhu politik. Apabila kita baca isi dari berita kali ini, lebih kepada menceritakan momen yang terjadi ketika Presiden Jokowi, Prabowo dan Hanifan berpelukan untuk merayakan kemenangan Hanifan setelah berhasil mengalahkan Nguyen Thai Linh asal Vietnam di ajang pertandingan final cabang pencak silat putra kelas C. Momen tersebut akhirnya dapat menyegarkan suhu politik yang tadinya sempat terjadi ketegangan politik antara kandidat yang bersaing yaitu Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019 yang akhirnya menimbulkan ketegangan serupa dikalangan para pendukung masing-masing capres tersebut. Ketegangan antar pendukung tersebut seakan tidak bisa terelakan menjelang pemilihan presiden tahun depan. Selain itu Suara Merdeka memberikan sub judul yang lebih tegas dengan pemberian warna merah dengan kalimat “Keakraban Jokowi – Prabowo Contoh bagi Pendukung”. Sub judul yang dimuat oleh redaksi Suara Merdeka seakan memberikan tanda untuk bagaimana ketegangan politik antar pendukung masing-masing calon presiden agar segera mengakhiri konflik politik yang berkepanjangan ini sehingga tercipta keakraban seperti apa yang dicontohkan calon presiden yang mereka dukung.

Selanjutnya adalah *lead*. Dalam berita edisi kali ini Suara Merdeka menggunakan *lead* yang menggambarkan bagaimana suasana yang terjadi di ajang Asian Games. Berikut kalimatnya:

Asian Games benar-benar menjadi momen yang mampu menyatukan dan menyejukkan suhu politik.

Lead di atas jelas memberikan penjelasan bagaimana suhu politik yang sebelumnya tegang dikarenakan adanya persaingan politik menjelang pemilihan presiden 2019 seakan berubah menjadi kebalikkannya yaitu sejuk atau damai karena adanya ajang Asian Games tersebut. Momen Asian Games seakan memberikan dampak positif bagi politik Indonesia saat ini. *Lead* yang digunakan mirip dengan judul *headline*, di sini akhirnya *lead* seakan menjadi sebuah penegasan kembali terhadap judul *headline* yang dibuat oleh Suara Merdeka pada edisi kali ini.

Latar informasi yang digunakan dalam *frame* kali ini adalah berkaitan dengan momen keakraban antara capres (petahana) Joko Widodo dan capres penantang Prabowo Subianto. Berikut kalimatnya:

Momen keakraban pun terjalin antara capres (petahan) Joko Widodo dan capres penantang Prabowo Subianto pada ajang final silat. Keakraban itu tergambar dalam momen berpelukkan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto saat merayakan kemenangan pesilat Hanifan Yudani Kusumah. Momen ini sanggup melelehkan seluruh rakyat.

Suara Merdeka pada edisi kali ingin memberikan sedikit kronologi bagaimana momen keakraban antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto bisa terjadi lewat latar informasi yang digunakannya. Dalam hal ini latar informasi seakan memberikan penjelasan lebih terkait momen yang dimaksudkan dalam *lead* yang disampaikan sebelumnya. Momen keakraban yang terjalin diantara kedua kandidat capres akhirnya membuat masyarakat juga ikut larut dalam keakraban, semuanya itu berkat Hanifan Yudani Kusumah yang seakan menjadi perantara dibalik keakraban yang terjadi, berkat selebrasi yang dibuatnya setelah memenangkan pertandingan final pencak silat. Selain itu terdapat latar informasi yang berkaitan dengan gerakan #2019gantipresiden, dimana pro dan kontra sering terjadi terkait adanya gerakan tersebut. Berikut latar informasinya:

Keakraban dan suasana cair antara Presiden Jokowi dan Prabowo yang akan bersaing dalam Pilpres itu menjadi angin segar yang mampu meredakan ketegangan politik antar pendukung akhir-akhir ini, terutama tentang pro dan kontra aksi deklarasi #2019gantipresiden. Momen ini tentu menjadi penanda untuk menyudahi benturan antar pendukung demi kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan nasional. Harapan untuk politik sehat, damai pun muncul dari kedua belah pihak.

Jokowi juga mengajak semua membangun pola pikir baru yang optimis dan berorientasi pada berpikir positif. Sebab tanpa optimisme dalam membangun hal-hal positif, Indonesia tidak akan pernah bisa bersaing

dengan negara-negara lain. Jokowi menyatakan pembangunan infrastruktur yang disebut dalam empat tahun terakhir adalah fondasi ke sana.

Keakraban antara Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto yang terjadi ketika Asian Games sedikit membuat dampak positif terhadap situasi politik saat ini. Selain itu, adanya aksi pro dan kontra terhadap gerakan #2019gantipresiden membuat benturan antar pendukung masing-masing calon presiden. Hal tersebut seakan tidak menggambarkan keakraban seperti apa yang dilakukan oleh kedua kandidat calon presiden di ajang Asian Games. Dalam latar informasi juga terdapat ajakan bahwa tidak sepatutnya para pendukung melakukan hal yang berujung dengan konflik, karena itu bukan sesuatu yang penting apabila dibandingkan dengan kepentingan nasional. Selain itu juga terdapat latar informasi yang memberikan ajakan terhadap semua masyarakat untuk memiliki pikiran yang positif, ajakan tersebut dibarengi dengan alasan-alasan yang membuat ajakan tersebut dapat diikuti oleh masyarakat luas. Latar informasi tersebut merupakan pernyataan yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi. Di sisi lain, Jokowi berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur adalah fondasi untuk bisa bersaing dengan negara lain. Dalam hal ini latar informasi seakan tidak ada kaitannya dengan judul *headline* yang diberikan. Latar informasi ini mungkin hanya sekedar informasi tambahan yang diberikan oleh Suara Merdeka.

Narasumber yang digunakan dalam edisi kali ini bertujuan untuk memperkuat isi dari berita yang disampaikan, dimana pernyataan Presiden Jokowi dan Prabowo seakan ditonjolkan oleh Suara Merdeka. Berikut pernyataannya:

“Saya mengucapkan terima kasih, yang kedua juga ingin memberikan selamat kepada teman baik saya, sahabat saya, Pak Prabowo Subianto yang mengomandani. Beliau adalah Ketua IPSI, sehingga kita tahu semuanya, kita mendapatkan emas dari cabang olahraga pecak silat ini 14, sehingga total sekarang ini kita mendapatkan emas 30. Saya kira ini semuanya untuk Indonesia, untuk negara, untuk rakyat semuanya,” ujar Jokowi di arena silat kompleks TMII, Rabu (29/8).

Hal senada juga diutarakan Prabowo. “Saya atas nama masyarakat pencak silat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, dan Ibu Presiden Indonesia. Bayangkan semua hadir di sini, disaat kritis ini, membangkitkan semangat masyarakat pencak silat. Kita bangga bisa berperan, bisa berbuat yang baik untuk negara dan bangsa. Kalau sudah untuk negara dan bangsa kita bersatu, tidak ada perbedaan,” tandasnya.

Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Prabowo itu disampaikan ketika jumpa pers setelah menyerahkan medali kepada para atlet. Mereka seakan menjaga keakraban yang terjalin sebelumnya melalui pernyataan-pernyataan yang keduanya sampaikan, keduanya seakan lupa bahwa sebenarnya mereka adalah

rival dalam memperebutkan kursi RI satu, tentunya mereka berdua sadar bahwa keakraban yang mereka jalin sudah sepatutnya dijaga. Prabowo juga menambahkan didalam pernyataannya terkait rasa bangganya terhadap pencapaian yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, beliau juga seakan mengajak masyarakat Indonesia untuk selalu bersatu dalam hal yang berkaitan dengan negara dan bangsa sehingga tidak ada perbedaan yang terjadi. Selain pernyataan Presiden Jokowi dan Prabowo juga terdapat pernyataan tambahan yang disampaikan oleh narasumber lainnya seperti Politikus PDIP Charles Honoris, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli zon

Kemudian pada bagian **penutup**, penutup yang digunakan Suara Merdeka merupakan pernyataan yang disampaikan langsung oleh Presidium Pusat KMHDI Putu Wiratnaya yang isinya pujian atas kinerja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam melakukan perubahan terkait infrastruktur yang berakibat pada turunnya angka kemiskinan karena adanya penggangguran. Berikut penutup yang disampaikan:

Presidium Pimpinan Pusat KMHDI Putu Wiratnaya menyatakan organisasinya tidak malu memberi apresiasi kepada Presiden Jokowi yang banyak melakukan perubahan, termasuk pembangunan infrastruktur karena berdampak pada penggangguran angka kemiskinan. “Kami berharap setelah pembangunan fisik, pemerintah wajib membangun sumber daya manusia,” katanya.

Selain itu, Putu Wiratnaya juga meminta dalam pernyataannya agar Presiden Joko Widodo tidak fokus dalam pembangunan fisik saja dan yang akhirnya melalaikan pembangunan sumber daya manusianya, padahal hal tersebut menurutnya juga sama pentingnya. Penutup di sini jelas tidak menggambarkan apa yang disampaikan pada judul *headline* terkait “Asian Games Menyejukkan Suhu Politik”, sosok Jokowi seakan banyak ditonjolkan dalam berita kali ini dalam bentuk pemberitaan yang positif.

Skrip yang digunakan dalam berita kali ini adalah unsur *what*, *who* dan *how*. *Headline* yang digunakan seakan memberikan gambaran apa yang terjadi dan itu dijelaskan di dalam isi berita yang ada dengan intensitas yang lebih karena pada dasarnya wartawan seakan tidak ingin terlalu melenceng dari judul *headline* yang telah dibuat akan tetapi pada penutup berita Suara Merdeka sedikit melenceng dari topik pembahasan terkait *headline* yang ditampilkan. Selain itu juga pernyataan-pernyataan dari narasumber juga menjadi pelengkap untuk dijadikan sebuah informasi tambahan yang mana jelas terlihat pernyataan dari Presiden Jokowi sangat mendominasi setiap isi berita meskipun ada sebagian pernyataan yang tidak sesuai dengan judul *headline* yang telah disajikan oleh wartawan Suara Merdeka. Penggunaan unsur *how* juga sangat terlihat dalam isi berita, di situ dijelaskan tentang bagaimana momen keakraban antara Presiden Jokowi dan Prabowo bisa terjadi. Selain itu juga bagaimana berita di atas dihubungkan dengan aksi #2019gantipresiden.

Struktur selanjutnya adalah **tematik**. Merupakan sebuah struktur yang dijadikan tema besar dalam sebuah berita yang disajikan. Di dalam paragraf pertama

berita di atas, secara garis besar Suara Merdeka edisi 30 Agustus 2018 mengangkat tema perihal Asian Games yang benar-benar menjadi momen yang mampu menyatukan dan menyejukkan suhu politik, dalam perhelatan tersebut terjadi momen keakraban antara Presiden Jokowi dan Prabowo yang mana mereka sedang bersaing dalam kegiatan politik Pilpres 2019 mendatang. Elemen tematik yang dapat dilihat dari berita di atas adalah koherensi, yaitu pilihan atau jalinan antar kalimat, misalnya :

Karena itu, Jokowi minta anak-anak muda dan mahasiswa tidak larut dalam perdebatan di media sosial.

Jokowi juga mengajak semua membangun pola pikir baru yang optimis dan berorientasi pada berpikir positif. **Sebab** tanpa optimisme dalam membangun hal-hal positif, Indonesia tidak akan pernah bisa bersaing dengan Negara-negara lain.

Penggunaan kata hubung karena itu, sebagai penjelas *lead* dan menjadi penekanan kalimat permintaan Presiden Jokowi terhadap generasi muda. Penggunaan kata sebab juga merupakan penjelasan tentang bagaimana Indonesia dapat bersaing dengan Negara-negara lain dengan adanya optimisme.

Selanjutnya adalah **retoris**. Retoris merupakan cara wartawan menekankan sebuah fakta yang terdapat di dalam sebuah berita. Ada beberapa elemen struktur retoris yang dipakai oleh wartawan. Yang paling penting adalah leksikon, pemilihan, dan pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai atau menggambarkan peristiwa.

Selain itu juga ada elemen grafis, yang digunakan untuk menekankan pesan dalam berita. Dan yang terakhir adalah metafora

Dalam *frame* ini, yang ditekankan adalah pemilihan foto, yang semuanya merupakan penggambaran keakraban antara Presiden Jokowi dan Prabowo. Pada foto berita edisi 30 Agustus 2018 Suara Merdeka memperlihatkan bagaimana Presiden Jokowi dan Prabowo asik berbincang di atas bangku penonton VIP, selain itu juga terdapat foto yang menampilkan bagaimana keakraban keduanya itu begitu erat, bagaimana tidak momen yang tertangkap dalam foto tersebut adalah momen dimana Presiden Jokowi, Prabowo dan Hanifan Yudani Kusumah saling berpelukan, hal tersebut merupakan selebrasi dari Hanifan setelah mengalahkan pesilat Nguyen Thai Linh asal Vietnam dipertandingan final pencak silat kelas C (50-55).

II. Frame : Gerakan #2019gantipresiden Memancing Permusuhan

Tabel 3.9 STRUKTUR SINTAKTIS

No	Terbit	Headline (Judul)
1	Sabtu, 1 September 2018	MUI Ajak Umat Santun Bersosmed
Lead		
1	Sabtu, 1 September 2018	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah prihatin dengan situasi politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (pileg) 2019.
Latar Informasi		
1	Sabtu, 1 September 2018	“Tidak jarang kita tonton di televisi tayangan para politisi yang saling menjatuhkan. Apalagi di media sosial (medsos), terang-terangan saling mengancam, menyebarkan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, dan menjelek-jelekkan orang lain.

		Kami mengajak mari gunakan medsos dengan santun dan berakhlakul karimah,” kata Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji, kemarin.
Kutipan, Sumber, Pernyataan		
1	Sabtu, 1 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Senada dengan MUI, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengingatkan masyarakat untuk tidak larut dalam suasana tegang di tahun politik. “Kita sudah berkali-kali menyelenggarakan pemilu. Mari kita lewati proses berbangsa dan bernegara itu dengan baik,” katanya. • Ketua Watim Ali Mufiz mengatakan, ditengah arus informasi yang begitu deras, netizen dituntut lebih cerdas dalam menerima berita dan informasi. Masyarakat perlu melakukan verifikasi atau cek ulang setiap kali menerima berita dan informasi dari media sosial.
Penutup		
1	Sabtu, 1 September 2018	Sementara Polda Jateng dan Kodam IV /Diponegoro telah mengirim 70 truk bantuan berupa sembako, pakaian dan kebutuhan hidup masyarakat. Sumbangan itu berasal dari Polres dan Kodim se-Jateng. “Ditambah bantuan khusus dari Kodam IV/Diponegoro dan Polda Jateng enam truk sembako,” katanya.

Frame kali ini menunjukkan bahwa media sosial seakan memiliki peran penting untuk menyebarkan isu kebencian dalam konteks politik, selain itu dalam *frame* berita di atas mengajak masyarakat untuk santun dalam menggunakan media sosial untuk bagaimana tidak mudah terpengaruh dengan segala macam hoaks yang beredar di media sosial apalagi hoaks yang berkaitan dengan politik. Penekanan *frame* berita di atas terlihat dari bagaimana narasumber yang diwawancarai yang erat kaitannya dengan jabatan yang diterimanya. Selain itu juga dijelaskan dalam *frame* kali ini bahwa

fenomena #2019gantipresiden cenderung memancing permusuhan dikalangan masyarakat.

Headline yang digunakan dalam berita Suara Merdeka edisi 1 September 2018 adalah MUI Ajak Umat Santun Bersosmed dengan pemberian sub judul Besok ke Lombok Serahkan Bantuan. Dalam *headline* berita di atas Suara Merdeka seakan ingin memaparkan bahwa sekarang ini penggunaan sosial media sangat jauh dari kata santun artinya banyak terjadi pelanggaran yang akhirnya menyebabkan kegaduhan di media sosial, semua itu terjadi dalam berbagai bentuk baik dari konten-konten negatif seperti penyebaran hoaks sampai penyebaran isu kebencian, apalagi sekarang eranya pesta demokrasi politik yang mana hal tersebut marak sekali terjadi di sosial media saat ini. Adapun sub judul yang ditampilkan dalam berita di atas yaitu soal penyerahan bantuan Lombok yang akan dilakukan besok.

Lead dalam berita di atas bagaimana kondisi politik saat ini yang menjadi sorotan MUI Jawa Tengah, mereka sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Berikut kalimatnya :

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah prihatin dengan situasi politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Dari *lead* di atas seakan menunjukkan bahwa kondisi politik saat ini jauh dari kata baik, sehingga membuat reaksi prihatin dari kalangan Majelis Ulama Indonesia khususnya di Jawa Tengah itu sendiri.

Selanjutnya **latar informasi** yang digunakan dalam berita di atas adalah bagaimana Suara Merdeka dalam edisi 1 September 2018 seakan menekankan terhadap isi berita dalam bentuk pernyataan narasumber yang berisi soal bagaimana sosial media digunakan untuk menyebarkan hal-hal negatif yang berkaitan dengan politik. Misalnya sebagai berikut :

Jangan gunakan sosmed untuk bermusuhan. Ini penting kami ingatkan untuk menghindari permusuhan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Gunakan media sosial untuk menyambung silaturahmi dan menambah wawasan, bukan untuk menyebarkan berita hoaks, hasutan, ujaran kebencian, maupun pesan-pesan bernada provokatif yang membuat gaduh bangsa,” katanya.

Kalimat di atas diutarakan oleh Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji yang menggambarkan bagaimana sosial media sekarang seakan menjadi media yang isinya tentang ujaran kebencian, hoaks, sampai hal-hal provokatif dan semua itu berkaitan dengan politik, secara tidak langsung hal tersebut seakan membuat masyarakat yang terlibat didalamnya menjadi musuh yang saling menjatuhkan, yang akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi taruhannya.

Sumber informasi berita di atas lebih menekankan pada pernyataan yang berkaitan dengan media sosial yang diharapkan dalam penggunaannya masyarakat setidaknya berperilaku santun. Berikut beberapa kutipannya :

“Tidak jarang kita tonton di televisi tayangan para politisi yang saling menjatuhkan. Apalagi di media sosial (medsos), terang-terangan saling mengancam, menyebarkan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, dan menjelek-jelekkkan orang lain. Kami mengajak mari gunakan medsos dengan santun dan berakhakul karimah,” kata Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji, kemarin.

“Jangan gunakan medsos untuk bermusuhan. Ini penting kami ingatkan untuk menghindari permusuhan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Gunakan media sosial untuk menyambung silaturahmi dan menambah wawasan, bukan untuk menyebarkan berita hoaks, hasutan, ujaran kebencian maupun pesan-pesan bernada provokatif yang membuat gaduh bangsa,” katanya.

Ketua Wantim Ali Mufiz mengatakan, di tengah arus informasi yang bergitu deras, netizen dituntut lebih cerdas dalam menerima berita dan informasi. Masyarakat perlu melakukan verifikasi atau cek ulang setiap kali menerima berita dan informasi dari media sosial.

Fenomena penggunaan #2019gantipresiden, menurutnya, juga cenderung memancing umat untuk saling berhadap-hadapan.

Dalam dua kalimat di atas disampaikan oleh Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji, kalimat tersebut seakan memberikan penekanan terhadap judul *headline* yang dibuat oleh Suara Merdeka edisi 1 September 2018. Kalimat di atas seakan mendiskripsikan dengan jelas sesuai dengan *headline*, dimana sosial media sekarang ini menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian atau semacamnya yang terkadang dilakukan oleh oknum politisi untuk menjatuhkan pihak lain dalam ajang politik. Selain itu juga terdapat himbuan untuk tidak menggunakan sosial media untuk saling memusuhi, hal tersebut dilakukan agar menghindari pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Gunakannlah sosial media untuk saling berhubungan baik dan untuk menambah wawasan. Kalimat selanjutnya juga seakan makin mempertegas suatu isi berita yang mana dalam penggunaan sosial media perlu adanya kehati-hatian dalam menerima setiap informasi, setiap informasi yang kita terima belum tentu semuanya benar, verifikasi dan cek ulang merupakan hal penting dalam setiap penerimaan informasi yang ada. Kemudian kalimat terakhir yang dinyatakan oleh Ali Mufiz Ketua Wantim menjelaskan bahwa #2019gantipresiden adalah salah satu contoh gerakan di sosial media yang dapat memancing masyarakat untuk saling bermusuhan, di sini secara tidak langsung #2019gantipresiden seakan menjadi sebuah gerakan atau aksi yang membuat gaduh dan dapat memecah belah persatuan bangsa.

Penutup berita di atas membahas sesuai dengan sub judul yaitu soal penyerahan bantuan ke Lombok, soal bagaimana kesiapan penyerahan bantuan tahap pertama yang dilakukan oleh MUI itu untuk membantu para korban gempa di Lombok. Kalimatnya sebagai berikut :

Dalam kesempatan itu Kiai Darodji melaporkan kesiapan MUI menyalurkan bantuan tahap pertama untuk korban gempa Lombok, Senin. “Dana yang terkumpul dari MUI , Baznas, anggota Korpri, Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), serta spontanitas dari Bapak Kapolda jumlahnya hampir Rp 2 Miliar. Akan kami serahkan melalui gubernur NTB,” katanya.

Penutup di atas seakan mendiskripsikan dengan jelas bagaimana kesiapan MUI Jawa Tengah yang diketuai oleh Kiai Darodji dalam memberikan bantuan terhadap para korban gempa di Lombok. Kalimat di atas juga memberikan informasi mengenai siapa saja yang memberikan bantuan yang akhirnya dikumpulkan oleh MUI Jawa Tengah. Penutup di sini terlihat memang tidak sesuai dengan topik pembahasan utama yang lebih fokus pada penggunaan media sosial. Penutup seakan menjadi informasi tambahan dalam berita yang disampaikan secara langsung oleh pihak MUI Jawa Tengah.

Unsur selanjutnya adalah **Skrip**. Pada berita di atas adalah unsur *what* dan *who*. Terlihat dari *headline* yang digunakan seakan memberikan gambaran topik yang akan dibahas dalam berita Suara Merdeka edisi 1 September 2018, terlihat juga pernyataan-

pernyataan dalam isi berita yang seakan menjadi penekan topik berita itu sendiri yaitu soal banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan sosial media saat ini terlebih dalam hal politik. Tentang siapa yang menyampaikan pernyataan tersebut juga ditonjolkan dalam berita di atas, karena itu juga menjadi salah satu hal yang penting di dalam sebuah berita untuk memberikan penguatan terhadap *frame*. Sejumlah pernyataan disampaikan oleh Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji, Ketua Wantim Ali Mufiz, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono. Semua pernyataan yang disampaikan terkait bagaimana penggunaan sosial media yang dijadikan media untuk menyebarkan kebencian dan saran untuk bagaimana menggunakan sosial media dengan baik, selain itu juga terdapat pernyataan soal laporan kesiapan pemerintah setempat dalam memberikan bantuan terhadap korban gempa di Lombok.

Tematik, tema yang diangkat dalam berita di atas adalah mengenai penggunaan sosial media yang banyak digunakan untuk menyebarkan hal-hal negatif yang sifatnya menjatuhkan pihak lain seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian sampai hal-hal yang bernada provokatif dalam rana politik. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum MUI Jateng, Ketua Wantim dan Kapolda Jateng. Elemen tematik yang dapat dilihat dari *frame* berita di atas adalah koherensi, yaitu pilihan atau jalinan kalimat, misalnya :

Apalagi di media sosial (medsos), terang-terangan saling mengancam, menyebarkan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, dan menjelek-jelekkkan orang lain.

Penggunaan kata apalagi, sebagai keterangan adanya pelanggaran lain yang terjadi selain di media televisi, yaitu pelanggaran yang sering terjadi di media sosial. Kalimat tersebut seakan menggambarkan bagaimana kondisi atau pelanggaran apa saja yang sering terjadi di media baik itu televisi maupun media sosial dalam konteks politik.

Retoris, pada *frame* kali ini, unsur yang ditekankan adalah leksikon. Seperti pada kata '**tidak jarang**,' pada berita Suara Merdeka edisi 1 September 2018 yang merupakan pernyataan dari Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji mengenai bagaimana kondisi media sekarang ini terutama televisi yang banyak mengandung politik yang menyimpang seperti menjahtuhkan politisi lain demi kepentingan pribadi. Hal di atas seakan menggambarkan bahwa kondisi media saat ini banyak dipengaruhi oleh pelanggaran-pelanggaran dalam konteks politik tujuan jelas untuk menjatuhkan lawan politik lainnya. Kemudian penggunaan kata '**senada dengan**,' sebagai keterangan adanya pernyataan lain yang ingin diberikan perihal ketegangan politik yang saat ini terjadi, bagaimana proses pemilu yang berulang kali dilakukan diharapkan dalam prosesnya dapat dilakukan dengan baik dan tidak hal yang tidak diinginkan. Kalimat di atas seakan menggambarkan bagaimana kondisi politik saat ini, permasalahan yang sama seakan terjadi setiap kali pemilu diadakan. Penggunaan kata '**khusus**,' sebagai gambaran bagaimana kondisi gempa Lombok yang perlu adanya bantuan lebih, yang mana tidak hanya bantuan berupa uang tunai melainkan bantuan berupa 100 anggota Brimob.

Adanya unsur lain selain leksikon, yaitu unsur grafis pada berita Suara Merdeka edisi 1 September 2018. Grafis tersebut berupa foto yang menggambarkan bagaimana Kapolda Jateng Irjen Pol Condro, Ketua Umum MUI Jateng KH Ahmad Darodji, Ketua Dewan Pertimbangan Ali Mufiz, Ketua KH Kharis Shodaqoh, dan pejabat Pemprov Jateng saling bergandengan tangan sesuai bersilahturahmi di kantor kompleks Masjid Raya Baiturrahman, Simpanglima, Semarang. Dari foto tersebut seakan bagaimana keakraban yang begitu erat yang diperlihatkan oleh para pejabat dan para alim ulama.

III. Frame : Gerakan Tagar Menimbulkan Konflik Horizontal dan harus diatur.

Tabel 3.10 STRUKTUR SINTAKTIS

No	Terbit	Headline (Judul)
1	Selasa, 4 September 2018	Gerakan Tagar Capres Diatur
Lead		
1	Selasa, 4 September 2018	Polri mengeluarkan surat perintah untuk jajaran soal pemberian izin acara gerakan tanda pagar (tagar) dukungan capres.
Latar Informasi		
1	Selas, 4 September 2018	“Jadi keinginan apa pun itu adalah berdasar UU No 9 tahun 1998. UU untuk menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa dilindungi UU. Namun pada pasal 6, ada beberapa poin yang harus dipedomani. Pertama dalam menyampaikan pendapat di muka umum berkawajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain,” tandas Kadiv Humas Mabes Polri Setyo di Jakarta
Kutipan, Sumber, Pernyataan		
1	Selasa, 4 September 2018	“Silahkan kalau tidak ada penolakan. Di situ ada penolakan kami melakukan penilaian ini boleh atau tidak. Kalau tidak boleh maka kami akan menyarankan tidak boleh. Kalau bubar sendiri

		Alhamdulillah. Kalau nggak mau bubar, kamu bubarkan. Kalau masyarakat menerima, tidak masalah. Kalau masyarakat mempermasalahkannya, itu bahaya dan bakal timbul kerusuhan,” jelas setyo.
Penutup		
1	Selasa, 4 September 2018	“Saya setuju. Semua kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, tidak mengindahkan norma yang berlaku, dan berpotensi merusak hubungan sosial yang ada, dibubarkan saja,” kata Taufiqulhadi.

Frame kali berkaitan dengan bagaimana tanda pagar (tagar) terkait dukungan terhadap capres yang akan memiliki aturan yang berlaku sehingga ketidaknyaman yang dirasakan oleh masyarakat karena dampak yang ditimbulkan dari gerakan tagar tersebut bisa dihindari. Fokus *frame* pada berita di atas lebih kepada bagaimana aturan yang berlaku di dalam setiap tagar pendukung capres.

Headline dalam berita Suara Merdeka edisi 4 September 2018 dengan judul *headline* Gerakan Tagar Capres Diatur, *headline* tersebut memberikan gambaran soal bagaimana gerakan tagar untuk mendukung masing-masing capres akan segera memiliki aturan yang berlaku. Aturan tersebut sebagai solusi agar ketidaknyaman yang dirasakan oleh masyarakat terhadap segala sesuatu yang mungkin ditimbulkan oleh gerakan tagar capres tersebut dapat dihindari. Akan tetapi secara langsung *headline* tersebut ingin menekankan bahwa gerakan tagar memiliki dampak yang kurang baik hingga akhirnya perlu adanya aturan yang mengatur hal tersebut.

Lead yang digunakan dalam berita edisi 4 September 2018 tersebut cenderung membahas bagaimana aturan yang seharusnya diterapkan untuk mengatur gerakan tagar tersebut. Sudut pandang yang diambil dalam berita di atas adalah dampak yang diakibat dari gerakan tersebut yang kebanyakan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Berikut kalimatnya :

Polri mengeluarkan surat perintah untuk jajaran soal pemberian izin acara gerakan tanda pagar (tagar) dukungan capres. Sebab dukungan itu bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Dalam *lead* di atas yang dijelaskan langsung oleh pihak Polri seakan menggambarkan bahwa gerakan dukungan tagar capres baik itu gerakan #2019gantipresiden maupun #2019tetapjokowi hanya menimbulkan konflik di masyarakat, sehingga tujuan dari gerakan tagar itu sendiri yaitu untuk mendukung masing-masing capres seakan dibatasi karena nantinya hanya akan timbul konflik semata.

Selanjutnya adalah **latar informasi**, dalam berita di atas latar informasi yang digunakan cenderung membahas bagaimana aturan yang berlaku atau seperti apa aturan yang seharusnya, untuk mengatur adanya gerakan tagar untuk mendukung masing-masing capres. Misalnya sebagai berikut:

“Jadi keinginan apa pun itu adalah berdasar UU No 9 tahun 1998. UU untuk menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa dilindungi UU. Namun

pada pasal 6, ada beberapa poin yang harus dipedomani. Pertama dalam menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain,” tandas Kadiv Humas Mabes Polri Setyo di Jakarta

Jelas pernyataan yang disampaikan di atas seakan mendiskripsikan bagaimana gerakan tagar sudah diatur dalam peraturan yang sudah berlaku yaitu UU yang membahas tentang bagaimana menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa yang senantiasa berada di dalam perlindungan UU tersebut. Dan dengan jelas pula UU berapa yang mengatur semua itu. Selain itu ada sebagian *lead* yang menyinggung tentang konflik yang akan ditimbulkan dari adanya gerakan tagar tersebut, yang akhirnya konflik yang terjadi di masyarakat menjadi pembahasan yang seakan ditonjolkan dalam berita Suara Merdeka edisi 4 September 2018. Misalnya sebagai berikut:

Dalam surat telegram yang beredar, munculnya gerakan tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi. Hal itu berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar pendukung capres-cawapres di tengah masyarakat.

Pada kalimat di atas, seakan menjelaskan bahwa gerakan tagar untuk mendukung capres seakan menjadi gerakan yang hanya akan menimbulkan konflik antar pendukung yang tentunya merugikan masyarakat sekitar. Maka dari itu dalam berita tersebut memberikan penjelasan mengenai perlu adanya aturan yang diterapkan agar terhindar dari konflik yang terjadi antar pendukung di masyarakat. Konflik yang

terjadi antar pendukung yang salah satu penyebabnya adalah karena gerakan tagar tersebut seakan menjadi sebuah alasan kenapa perlu adanya aturan yang seharusnya diberlakukan untuk mengatur gerakan tersebut.

Narasumber yang digunakan dalam berita Suara Merdeka edisi 4 September 2018 lebih menekankan pada aturan yang diberlakukan untuk mengatur gerakan tagar pendukung masing-masing capres tersebut. Berikut beberapa kutipannya:

“Jadi keinginan apa pun itu adalah berdasar UU No 9 tahun 1998. UU untuk menyampaikan aspirasi atau unjuk rasa dilindungi UU. Namun pada pasal 6, ada beberapa poin yang harus dipedomani. Pertama dalam menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain,” tandas Kadiv Humas Mabes Polri Setyo di Jakarta.

“Ketika terjadi konflik polisi bisa mengambil keputusan dengan pasal 15 dimana dalam pasal itu pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan. Apabila tidak memenuhi ketentuan bagaimana dimaksud pasal 6, ini bisa dibubarkan. Kalau dia tidak mau dibubarkan maka dia dikenakan UU Pidana Pasal 211-218,” jelas Setyo

Dua kalimat di atas merupakan pernyataan yang disampaikan secara langsung oleh Kadiv Humas Mabes Polri Setyo. Pernyataan tersebut seakan menjadi sebuah

penekanan terhadap situasi konflik antar pendukung yang mungkin terjadi akibat adanya gerakan tagar antar pendukung capres di masyarakat.

Penutup yang digunakan dalam berita Suara Merdeka edisi 4 September 2018 adalah mengenai dukungan perihal adanya aturan dari Polri mengenai gerakan tagar pendukung capres tersebut. Berikut kalimatnya:

“Itu mengatur, bukan melarang. Mengatur gerakan-gerakan akan di luar tim resmi KPU. Sementara aturan untuk tim sukses sudah ada PKPU,” kata Dasco.

“Saya setuju. Semua kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, tidak mengindahkan norma yang berlaku, dan berpotensi merusak hubungan sosial yang ada, dibubarkan saja,” kata Taufiqulhadi.

Kedua pernyataan di atas disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR F-Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Anggota Komisi III DPR F-Nasdem Teuku Taufiqulhadi yang menyatakan bahwa keduanya mendukung penuh dengan adanya aturan Polri yang nantinya akan mengatur gerakan tagar tersebut. Tidak adanya sebuah larangan terhadap gerakan tagar tersebut, akan tetapi gerakan tersebut hanya di atur sedemikian rupa agar tidak terjadi hal yang tidak semestinya. Pernyataan yang disampaikan oleh Taufiqulhadi sendiri seakan menekankan bahwa gerakan-gerakan tagar pendukung capres hanya akan menimbulkan konflik yang akhirnya merusak hubungan sosial yang ada, dan untuk menghindari itu gerakan tagar harus dibubarkan.

Skrip, pada berita ini yang ditonjolkan adalah unsur *what*, *who* dan *how*. Lebih menjelaskan aturan yang diberlakukan terhadap gerakan tagar pendukung capres dan dampak yang akan ditimbulkan oleh gerakan tagar tersebut. Struktur skrip lebih menekankan pada pernyataan yang menjelaskan aturan di dalam UU tentang bagaimana aturan tersebut mengatur jalannya gerakan-gerakan yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat seperti gerakan tagar pendukung capres. Pernyataan tersebut pun disampaikan oleh pihak yang berkaitan secara langsung terhadap aturan yang berlaku tersebut yaitu pihak Polri dan hal tersebut menjadi sebuah penekanan terhadap isi berita yang disampaikan. Dijelaskan pula tentang bagaimana aturan tersebut berlaku dan seperti apa konsekuensi yang diambil apabila gerakan tagar tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Struktur **tematik** dari berita yang disampaikan oleh Suara Merdeka edisi 4 September 2018 ini menunjukkan bahwa aturan yang diberlakukan oleh pihak Polri sebisa mungkin dapat mencegah terjadinya konflik yang mungkin ditimbulkan oleh adanya gerakan tagar capres tersebut. Selain itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum seperti halnya gerakan tagar pendukung capres harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait yaitu Polri. Berikut kalimatnya:

Dalam surat telegram yang beredar, munculnya gerakan tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi. Hal itu berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar pendukung capres-cawapres di tengah masyarakat.

Karena itu, jika ada kegiatan dari gerakan tagar dukungan capres yang bersifat penyampaian pendapat di muka umum, wajib diberitahukan secara tertulis.

Demikian pula kegiatan gerakan tagar pendukung capres yang mengarah pada kegiatan politik. Sesuai PP No 60 Tahun 2017, kegiatan ini juga wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

Penggunaan kalimat pertama di atas seakan menyatakan bahwa gerakan tagar seperti #2019gantipresiden dan #2019tetapjokowi hanya akan menimbulkan konflik horizontal antar pendukung capres di tengah masyarakat, padahal seperti diketahui bahwa gerakan tersebut merupakan gerakan penyampaian pendapat di muka umum. Sedangkan kalimat selanjutnya lebih menjelaskan tentang bagaimana gerakan tagar itu diatur oleh pihak Polri dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut ditekankan dengan adanya kata **karena itu**. Di kalimat terakhir ada penggunaan kata **demikian pula** yang digunakan sebagai penonjolan bahwa kalimat di atas menjelaskan gerakan tagar tersebut merupakan kegiatan politik dan sebagaimana mestinya kegiatan tersebut harus memiliki izin dan pihak Polri wajib mengetahui hal tersebut. Tujuannya jelas agar segala kemungkinan yang terjadi baik itu buruk atau tidak bisa diantisipasi dengan baik.

Retoris, frame yang terdapat dalam berita ini adalah leksikon. Pada berita Suara Merdeka edisi 4 September 2018 leksikon ditampilkan pada kalimat “Dalam surat telegram yang beredar, munculnya gerakan tagar #2019GantiPresiden dan

#2019TetapJokowi. Hal itu berpotensi menimbulkan **konflik horizontal** antar pendukung capres-cawapres di tengah masyarakat”. **Konflik horizontal** merupakan sebuah konflik yang terjadi antar individu atau kelompok organisasi yang memiliki kedudukan yang sama atau setara, dan konflik yang dimaksud dalam kalimat di atas adalah konflik yang terjadi antar pendukung masing-masing capres yang akhirnya dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

IV. Frame: Gerakan #2019gantipresiden Ditolak Mahfud MD

Tabel 3.11 STRUKTUR SINTAKTIS

No	Terbit	Headline (Judul)
1	Kamis, 6 September 2018	Sri Sultan: Merdeka dan Beradab Itu Saling Menguatkan
Lead		
1	Kamis, 6 September 2018	Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa merdeka dan beradab merupakan dua kata yang saling beiringan dan menguatkan.
Latar Informasi		
1	Kamis, 6 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Menurutnya merdeka tanpa adab berarti setiap orang bisa berbuat sesuka hati di luar koridor hukum. Sebaliknya beradab tanpa kemerdekaan seperti burung peliharaan yang terkurung di dalam sangkar emas. • Sementara itu anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengatakan kelompok gerakan #2019gantipresiden pernah menghubunginya untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.
Kutipan, Sumber, Pernyataan		
1	Kamis, 6 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Ia melanjutkan Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan keserasian makna merdeka dan nilai keadaban. Pancasila menjadikan pendidikan ilmu hukum

		<p>memperoleh landasan spiritual moral dan etik yang bersumber dari kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Mahaesa dan berkebudayaan, sebagaimana pidato lahirnya Pancasila oleh Bung Karno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namun dia menolak karena perbedaan keinginan. “Pernah diajak untuk bergabung dengan mereka yang aktif dalam gerakan ganti presiden tapi karena ada perbedaan keinginan saya tidak ingin ikut,” ungkap Mahfud.
Penutup		
1	Kamis, 6 September 2018	“Saya dihubungi kelompok ganti presiden untuk membuat dukungan atau memberi penjelasan yang sifatnya testimony. Saya bilang saya tidak mau, saya tidak setuju. Saat itu saya mau kalau tagarnya 2019 pemilihan presiden,” tandasnya.

Frame kali lebih menjelaskan bagaimana menjadi orang yang beradab dalam sebuah kemerdekaan itu penting, maksudnya adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang semestinya bisa diatur sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyalahi aturan tersebut, apalagi sampai melanggar hukum. Kemerdekaan yang ada bukan berarti membuat seseorang bebas melakukan apapun yang dia mau. Selain itu Suara Merdeka dalam beritanya seakan menunjukkan penolakan Mahfud MD terhadap gerakan #2019gantipresiden, perbedaan pendapat menjadi alasan utama kenapa beliau menolak gerakan tersebut.

Headline pada berita Suara Merdeka edisi 6 September 2018 yang berjudul “Sri Sultan: Merdeka dan Beradab Itu Saling Menguatkan”, judul yang diambil merupakan kutipan dari pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengajak masyarakat

untuk memiliki sikap beradab dalam sebuah kemerdekaan. Pernyataan tersebut diungkapkan ketika beliau menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan dengan tema “Indonesia Merdeka Indonesia Beradab” di kampus Universitas Islam Indonesia. Judul yang diberikan sebagian sesuai dengan isi yang diberitakan, selain itu ada penambahan berita mengenai tanggapan Mahfud MD perihal gerakan #2019gantipresiden yang dimana beliau menolak untuk bergabung di dalam gerakan tersebut.

Lead yang digunakan dalam berita Suara Merdeka kali ini adalah membahas bagaimana kemerdekaan Indonesia yang harus diikuti oleh sikap yang beradab dari masyarakatnya. Karena dua hal tersebut merupakan hal yang saling beriringan dan saling menguatkan satu sama lain. Berikut kalimatnya:

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa merdeka dan beradab merupakan dua kata yang saling beriringan dan menguatkan.

Dari *lead* di atas, Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY seakan ingin memberikan penekanan melalui pernyataannya terhadap isi berita Suara Merdeka edisi 6 September 2018 yang berkaitan dengan bagaimana sikap beradab dalam kehidupan yang merdeka. Kemerdekaan bukanlah sesuatu hal yang mengharuskan seseorang berhak untuk melakukan apapun yang dia mau yang akhirnya keluar dari koridor hukum yang berlaku. Sikap beradab sudah sepatutnya dimiliki oleh masyarakat untuk bagaimana kemerdekaan itu tetap sesuai dengan kaidahnya yang baik.

Selanjutnya adalah **latar informasi**, dalam beritanya Suara Merdeka memberikan informasi mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait kemerdekaan yang beradab yang dimana kedua hal tersebut sangat erat kaitannya. Berikut kalimatnya:

Menurutnya merdeka tanpa adab berarti setiap orang bisa berbuat sesuka hati di luar koridor hukum. Sebaliknya beradab tanpa kemerdekaan seperti burung perliharaan yang terkurung di dalam sangkar emas.

Kalimat di atas merupakan kalimat pernyataan dimana masyarakat yang merasa memiliki kemerdekaan itu harus memiliki adab yang baik, karena pada dasarnya orang yang tidak memiliki adab dalam sebuah kemerdekaan, bisa saja melakukan hal-hal yang keluar dari jalur hukum yang sudah ditetapkan. Selain itu, ada kalimat lain yang dijadikan latar informasi terkait gerakan #2019gantipresiden yang dimana hal tersebut tidak dibahas di dalam judul berita. Kalimatnya sebagai berikut:

Sementara itu anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD mengatakan kelompok gerakan #2019gantipresiden pernah menghubunginya untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.

Latar informasi yang merupakan kalimat di atas seakan memberikan gambaran bagaimana respon yang akan diberikan Mahfud MD terhadap ajakan untuk terlibat di dalam kegiatan kelompok gerakan #2019gantipresiden tersebut.

Pada **sumber** dan **kutipan pernyataan**, berita ini mengambil dari banyaknya pernyataan yang disampaikan secara langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X perihal kemerdekaan yang beradab. Berikut kalimatnya:

Ia melanjutkan Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan keserasian makna merdeka dan nilai keadaban. Pancasila menjadikan pendidikan ilmu hukum memperoleh landasan spiritual moral dan etik yang bersumber dari kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Mahaesa dan berkebudayaan, sebagaimana pidato lahirnya Pancasila oleh Bung Karno.

Dalam pernyataannya Sri Sultan menganggap bahwa pendidikan ilmu hukum seakan mendapatkan landasan spiritual dan etik berkat adanya nilai yang terkandung di dalam Pancasila yaitu nilai Kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Mahaesa dan berkebudayaan. Selain itu terdapat pernyataan lain yang disampaikan langsung oleh anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD perihal kaitannya dengan gerakan #2019gantipresiden. Berikut kalimat pernyataannya:

Namun dia menolak karena perbedaan keinginan. “Pernah diajak untuk bergabung dengan mereka yang aktif dalam gerakan ganti presiden tapi karena ada perbedaan keinginan saya tidak ingin ikut,” ungkap Mahfud.

Kutipan di atas seakan menjadi sebuah penekan terhadap latar informasi terkait respon yang akan diberikan oleh Mahmud MD terhadap ajakan yang diterimanya untuk ikut bergabung dalam kelompok gerakan #2019gantipresiden. Penolakannya terhadap

gerakan #2019gantipresiden itu lah yang seakan menjadi penguat bingkai pemberitaan terkait gerakan tersebut. Penolakan itu terjadi karena menurutnya gerakan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, beliau memilih untuk mengambil sikap netral, menurutnya dalam pemilihan presiden dapat saja terjadi pergantian presiden dan bisa saja petahana kembali mendapatkan posisinya. Oleh karena itu beliau memberikan ide tentang gerakan #2019pemilihanpresiden daripada bergabung dengan #2019gantipresiden.

Penutup, dalam berita kali ini Suara Merdeka memberikan penutup perihal kronologi yang berkaitan dengan ajakan terhadap Mahfud MD untuk bergabung dengan kelompok gerakan #2019gantipresiden. Beliau diminta untuk direkam dan dimintai pendapat mengenai gerakan #2019gantipresiden yang kemudian hasil dari rekaman tersebut diviralkan. Berikut kalimatnya:

“Saya dihubungi kelompok ganti presiden untuk membuat dukungan atau memberi penjelasan yang sifatnya testimoni. Saya bilang saya tidak mau, saya tidak setuju. Saat itu saya mau kalau tagarnya 2019 pemilihan presiden,” tandasnya.

Hal tersebut semakin menguatkan *frame* terhadap gerakan #2019gantipresiden yaitu bagaimana penolakan Mahmud MD untuk ikut bergabung dengan gerakan tersebut, dalam pernyataannya beliau tidak mau dan tidak setuju dengan adanya gerakan #2019gantipresiden tersebut. Adanya perbedaan pendapat antara Mahfud MD

dan kelompok gerakan tersebut yang menjadi alasan adanya penolakan, Mahfud MD lebih setuju dengan adanya tagar pemilihan presiden bukan tagar ganti presiden.

Skrip, pada berita ini yang ditonjolkan adalah unsur *what*, *who*, dan *why*. Terlihat dari bagaimana penjelasan yang disampaikan mengenai kemerdekaan yang berabad yang sesuai dengan judul *headline* yang ditampilkan oleh Suara Merdeka edisi 6 September 2018 tersebut. Selain itu juga terdapat penggalan kalimat yang berkaitan dengan gerakan #2019gantipresiden yang dimana kalimat tersebut lebih banyak menyinggung soal penolakan Mahfud MD untuk bergabung ke dalam kelompok gerakan #2019gantipresiden. Adanya pernyataan-pernyataan yang disampaikan semakin memperkuat isi berita tersebut seperti pernyataan yang disampaikan secara langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengenai sikap yang beradab itu penting dimiliki oleh masyarakat yang merdeka, selain itu juga ada pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD selaku anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang memberikan tanggapan perihal gerakan #2019gantipresiden. Dalam pernyataannya Mahfud MD mengaku tidak setuju dan tidak ingin bergabung dengan gerakan #2019gantipresiden alasan jelas karena perbedaan pendapat dan keinginan yang dimiliki, Mahfud MD lebih menginginkan tagar pemilihan presiden daripada harus bergabung dengan tagar ganti presiden.

Berikutnya adalah **tematik**, tema yang digunakan dalam berita ini adalah kemerdekaan yang dimiliki oleh suatu Negara sudah selayaknya dibarengi dengan sikap yang beradab dari masyarakatnya, selain itu juga dalam berita ini sedikit

menyinggung soal gerakan #2019gantipresiden yang dimana sebagian pernyataan Mahfud MD menjadi penekanan terhadap isu tersebut. Adapun bentuk kalimat yang digunakan dalam berita ini seperti yang terdapat dalam kalimat:

Menurutnya merdeka tanpa adab berarti setiap orang bisa berbuat sesuka hati di luar koridor hukum. Sebaliknya beradab tanpa kemerdekaan seperti burung peliharaan yang terkurung di dalam sangkar emas.

Kalimat di atas seakan ingin menjelaskan bagaimana pentingnya sebuah adab dalam sebuah kemerdekaan. Seakan menjadi sebuah komponen yang tidak bisa dipisahkan, merdeka dan beradab adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Selain itu juga terdapat koherensi yang jelas terlihat di kalimat:

Namun dia menolak kerana perbedaan keinginan. “Pernah diajak untuk bergabung dengan mereka yang aktif dalam gerakan ganti presiden tapi karena ada perbedaan keinginan saya tidak ingin ikut,” ungkap Mahfud

kata **namun** seakan menjadi kata yang ingin memberikan penjelasan lebih terhadap kalimat sebelumnya. Kalimat di atas merupakan alasan yang disampaikan oleh Mahfud MD terkait penolakannya untuk bergabung dengan kelompok gerakan #2019gantipresiden. Adanya perbedaan pendapat dan keinginan yang menjadi landasan atas penolakan tersebut. Beliau juga menyatakan tidak setuju dengan adanya gerakan tersebut, beliau lebih memilih untuk membuat gerakan tagar baru dengan tagar 2019 pemilihan presiden. Hal tersebut dilakukan mungkin untuk menghindari

keberpihakan beliau terhadap salah satu kubu. Selain itu juga terdapat detail dalam berita ini, berikut kalimatnya:

“Saya dihubungi kelompok ganti presiden untuk membuat dukungan atau memberi penjelasan yang sifatnya testimoni. Saya bilang saya tidak mau, saya tidak setuju. Saat ini saya mau kalau tagarnya 2019 pemilihan presiden,” tandasnya

Kalimat di atas secara detail menjelaskan bagaimana penolakan yang diungkapkan oleh Mahfud MD kepada kelompok ganti presiden tersebut. Seakan menjadi penegasan terhadap isi berita yang berkaitan dengan gerakan #2019gantipresiden dan kalimat di atas juga menjadi kalimat penutup dalam berita ini.

Retoris, adanya unsur leksikon dan metafora yang digunakan dalam berita ini. Leksikon disini terdapat pada kalimat yang diungkapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengatakan “Ditengah **suburnya** tebaran virus dan merasuknya **infeksi** di Indonesia, kaum intelektual hendaknya merasa terpanggil untuk **menyirami** Indonesia dengan **air kesejukan**. Air membawa harapan yang mengingatkan kalau masih ada obat, masih ada jalan keluar dan masih akan ada Indonesia pada masa depan,” papar Sri Sultan. Pada kata **suburnya** seakan ingin menggantikan kata banyak, kemudian kata **infeksi** yang merupakan kata lain dari sesuatu yang sedang terjadi, mungkin **infeksi** yang dimaksud di sini bukan berkaitan dengan penyakit yang diderita. Kata **menyirami** juga seakan ingin menggambarkan sesuatu lain yang berkaitan dengan memberikan kesegaran, kesegaran disini bukan

berarti dalam arti yang sebenarnya, maksud dari memberikan kesegaran adalah memberikan sesuatu yang baik, berarti **menyirami** adalah memberikan sesuatu yang baik, Terakhir adalah **air kesejukan**, kata tersebut seakan ingin menggambarkan suatu kedamaian yang dimana kedamaian tersebut identik dengan kesejukan.

Metafora yang terdapat dalam berita ini ada pada kalimat pernyataan yang juga disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dimana beliau mengatakan bahwa “Menurutnya merdeka tanpa adab berarti setiap orang bisa berbuat sesuka hati di luar koridor hukum. Sebaliknya beradab tanpa kemerdekaan **seperti burung peliharaan yang terkurung di dalam sangkar emas.**” Pada kalimat **seperti burung peliharaan yang terkurung di dalam sangkar emas** memiliki makna yang berarti seseorang yang merasa kehidupannya dalam kekangan. Kekangan yang dimaksud adalah seseorang yang tidak memiliki kebebasan dalam hidupnya dimana seseorang tersebut diatur akan tetapi orang tersebut tidak suka dengan aturan tersebut.

B. Bingkai Pemberitaan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat.

I. Frame: Penolakan Terhadap Gerakan #2019gantipresiden Di Solo

Tabel 3.12 STRUKTUR SINTAKTIS

No	Terbit	Headline (Judul)
1	Minggu, 2 September 2018	Rencana Kegiatan Jalan Sehat di Solo Ditolak Oleh Sejumlah Elemen Masyarakat
2	Kamis, 6 September 2018	Polda Jateng Tak Beri Izin Gerak Jalan ‘Neno’ di Solo
Lead		

1	Minggu, 2 September 2018	Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Hilmi Ahmad Saktillah mengatakan pihaknya menyerap aspirasi dari massa akar rumput Solo Raya, terkait akan dilangsungkannya jalan sehat, Minggu (9/9) di Kota Barat, Solo.
2	Kamis, 6 September 2018	Rencana gerak jalan sehat yang akan menghadirkan para pengusung #2019gantipresiden, seperti Neno Warisman dan Ahmad Dhani, Minggu (9/9) di Lapangan Kota Barat Solo tidak mendapatkan izin dari Polda Jateng
Latar Informasi		
1	Minggu, 2 September 2018	Intinya, PCNU tidak setuju rencana kegiatan jalan sehat yang dianggap bermuatan politis, karena diperkirakan bisa menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
2	Kamis, 6 September 2018	Hal itu ditegaskan Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Rabu (5/9) kepada wartawan di Kantor Direktorat Kriminal Khusus, Jalan Sukun Semarang. Menurut Kapolda, tidak dikeluarkannya izin itu dengan berbagi pertimbangan dan alasan. Di antaranya, karena selain gerak jalan yang merupakan keramaian umum bersifat hiburan, olahraga dan kebudayaan yang oleh panitia akan diisi orasi politik dan secara kebetulan lapangan tersebut pada hari yang sama dilangsungkan kegiatan Pekan Olahraga warga Solo (Porwaso) sebagai bagian dari peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas).
Kutipan, Sumber, Pernyataan		
1	Minggu, 2 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> “Memang ada wacana, Ketua PAC NU se Solo Raya akan membuat surat pernyataan menolak kegiatan jalan sehat tersebut dan akan ditandatangani semua Ketua PAC NU se Solo Raya. Surat tersebut akan dikirimkan ke Bupati, Komandan Kodim (Dandim) dan Kapolres se Solo Raya,” paparnya.

		<ul style="list-style-type: none"> • “Memang sekarang ini era demokrasi, tapi seharusnya sebagai tamu mereka harusnya empati, kalau mereka ditolak oleh masyarakat, tetapi tetap memaksa, dipastikan akan memunculkan keresahan. Apalagi, di tempat dan waktu yang sama, akan ada kegiatan tahunan Pemerintah kota Solo yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Warga Solo (Porwaso).”
2	Kamis, 6 September 2018	“Saya sudah menerima surat dari Walikota Solo terkait dengan digelarnya kegiatan Haornas di Lapangan Barat Solo,”. jelas Kapolda sambil menyinggung pihaknya telah mengirimkan surat kepada panitia jalan sehat. Adapun isinya kegiatan itu tidak diberikan izin dengan alasan kamtibmas.
Penutup		
1	Minggu, 2 September 2018	Hilmi Ahmad menambahkan seharusnya kalau memang akan olahraga gerak jalan sehat, ya olahraga saja jangan dicampuradukkan dengan menuntut macam-macam.
2	Kamis, 6 September 2018	Menurut Kapolda pada acara Haornas nanti dihadirkan para pahlawan Asian Games peroleh medali emas berasal dari daerah Jawa Tengah. Apabila pihak panitia, meski tidak mengantongi izin, tetap menggelar gerak jalan menghadirkan artis Neno Warisman dan Ahmad Dhani, pihaknya akan bertindak tegas membubarkannya.

Frame dalam berita kali ini adalah bagaimana gerakan #2019gantipresiden mendapatkan penolakan dari berbagai pihak seperti Polda Jateng dan elemen masyarakat lainnya, hal tersebut dilakukan karena gerakan #2019gantipresiden bisa mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban yang ada selain itu juga adanya gerakan tersebut dapat menimbulkan pro dan kontra. Awal dari kegiatan yang diadakan adalah jalan sehat untuk memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Lapangan

Barat Solo, akan tetapi gerak jalan tersebut sarat akan muatan politik yaitu gerakan #2019gantipresiden itu sendiri.

Headline berita pertama yang berjudul “Rencana Kegiatan Jalan Sehat di Solo” *headline* tersebut memberikan gambaran mengenai kegiatan apa yang akan diselenggarakan di Solo, kemudian ditambah dengan sub judul “Ditolak Oleh Sejumlah Elemen Masyarakat” dengan penggunaan ukuran font yang lebih besar dan tebal, seakan ingin memberikan penekanan terhadap siapa yang menolak kegiatan jalan sehat tersebut. Secara keseluruhan judul *headline* tidak memberikan informasi yang menyeluruh mengenai apa yang sebenarnya terjadi, *headline* lebih berfokus dengan penolakan perihal kegiatan jalan sehat yang terjadi tanpa memberikan alasan yang jelas kenapa penolakan tersebut dilakukan. Namun apabila dibaca isi dari berita ini seakan jelas memberikan gambaran menyeluruh perihal judul *headline* yang diberikan yaitu tentang bagaimana penolakan yang dimaksudkan adalah penolakan terhadap kegiatan jalan sehat yang mengandung muatan politik karena hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif seperti terganggunya keamanan dan ketertiban yang ada. Dalam hal ini muatan politik yang dimaksud tidak begitu detail dijelaskan, namun dalam kegiatan gerak jalan tersebut nampak akan menghadirkan tokoh politik seperti Neno Warisman dan Ahmad Dhani, jika melihat dari kedua tokoh tersebut ada erat kaitannya dengan gerakan #2019gantipresiden.

Sedangkan **headline** berita kedua hampir sama dengan *headline* berita pertama yaitu berkaitan dengan penolakan kegiatan gerak jalan tersebut, akan tetapi dalam

headline kedua ini lebih memberikan detail tentang siapa yang menolak kegiatan tersebut yaitu Polda Jateng dan adanya penekanan terhadap kalimat setelah gerak jalan yaitu ‘Neno’, hal tersebut secara tidak langsung menyiratkan bahwa kegiatan gerak jalan sarat akan muatan politik karena judul yang digunakan terdapat nama tokoh yang berkaitan dengan gerakan #2019gantipresiden yaitu Neno Warisman. Di dalam isi beritanya kegiatan gerak jalan tersebut selain dihadiri oleh Neno Warisman juga dihadiri oleh pengusung gerakan #2019gantpresiden lainnya yaitu Ahmad Dhani.

Lead yang digunakan oleh edisi 2 September 2018 membahas bagaimana pendapat yang diungkapkan secara langsung oleh ketua PCNU Hilmi Ahmad Sakdillah soal akan diselenggarakannya kegiatan gerak jalan tepatnya di Kota Barat, Solo. Berikut kalimatnya:

Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Hilmi Ahmad Sakdillah mengatakan pihaknya menyerap aspirasi dari massa akar rumput Solo Raya, terkait akan dilangsungkannya jalan sehat, Minggu (9/9) di Kota Barat, Solo. (2 September 2018).

Pada *lead* tersebut, Kedaulatan Rakyat seakan ingin memberikan penekanan terhadap isi berita yang nantinya akan disampaikan, dengan dihadirkannya Ketua PCNU Hilmi Ahmad Sakdillah sebagai narasumber, yang diharapkan pendapat yang disampaikan dapat memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat dalam menyikapi situasi yang terjadi.

Kemudian, pada *lead* edisi 6 September 2018 lebih kepada sikap Polda Jateng terhadap rencana gerak jalan sehat yang nantinya akan dihadiri oleh para pengusung #2019gantipresiden di Lapangan Kota Barat Solo. Berikut kalimatnya:

Rencana gerak jalan sehat yang akan menghadirkan para pengusung #2019gantipresiden. Seperti Neno Warisman dan Ahmad Dhani, Minggu (9/9) di Lapangan Kota Barat Solo tidak mendapatkan izin dari Polda Jateng. (6 September 2018).

Kedaulatan Rakyat seakan ingin menyampaikan secara langsung soal penolakan yang terjadi, terlihat bagaimana *lead* yang disampaikan secara tegas memberikan informasi pihak mana yang tidak mengizinkan diadakannya gerak jalan sehat tersebut, karena gerak jalan sehat tersebut sarat akan muatan politik dengan dihadirkannya para pengusung #2019gantipresiden yaitu Neno Warisman dan Ahmad Dhani yang jelas itu bertentangan dengan agenda utamanya yaitu jalan sehat. Adanya hal tersebut cukup memberikan alasan kenapa pihak Polda Jateng tidak memberikan izin terhadap rencana gerak jalan sehat tersebut.

Latar informasi yang digunakan pada edisi 2 September 2018 adalah bagaimana PCNU tidak setuju dengan rencana kegiatan jalan sehat tersebut karena dianggap bermuatan politisi, dalam latar informasi tersebut seakan menjelaskan mengenai alasan terhadap penolakan yang terjadi, dan hal tersebut tidak ditemukan pada judul *headline* yang ditampilkan. Latar informasinya sebagai berikut:

Intinya, PCNU tidak setuju rencana kegiatan jalan sehat yang dianggap bermuatan politisi, karena diperkirakan bisa menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban (2 September 2018)

Dalam latar informasi di atas terdapat dampak yang akan terjadi apabila kegiatan jalan sehat tersebut diadakan. Hal tersebut seakan menjadi sebuah penekanan terhadap alasan kenapa penolakan tersebut baik untuk dilakukan oleh pihak PCNU. Disebutkan bahwa dampak yang akan ditimbulkan yaitu terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban, seakan sudah menjadi sebuah kepastian yang nantinya akan terjadi ketika kegiatan tersebut diadakan.

Selanjutnya pada latar informasi edisi 6 September 2018 Keadaulatan Rakyat membahas perihal bagaimana sikap Polda Jateng terhadap rencana gerak jalan sehat tersebut hampir sama dengan *lead* yang ditampilkan sebelumnya, akan tetapi disini latar informasi menjadi sebuah penegasan tambahan terhadap isi *lead* yang ditampilkan. Berikut latar informasi yang diberikan:

Hal itu ditegaskan Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono, Rabu (5/9) kepada wartawan di Kantor Direktorat Kriminal Khusus, Jalan Sukun Semarang. Menurut Kapolda, tidak dikeluarkannya izin itu dengan berbagi pertimbangan dan alasan. Di antaranya, karena selain gerak jalan yang merupakan keramaian umum bersifat hiburan, olahraga dan kebudayaan yang oleh panitia akan diisi orasi politik dan secara kebetulan lapangan tersebut pada hari yang sama dilangsungkan kegiatan Pekan

Olahraga warga Solo (Porwaso) sebagai bagian dari peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) (6 September 2018).

Latar informasi di atas seakan ingin memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai tidak diberikannya izin terhadap gerak jalan sehat tersebut. Adanya pernyataan langsung yang disampaikan oleh Kapolda Jateng semakin memberikan penegasan terhadap penolakan yang terjadi. Sejumlah alasan-alasan pun disampaikan terkait penolakan itu, mulai dari rencana kegiatan bermuatan politik sampai dengan acara gerak jalan bersamaan dengan kegiatan Pekan Olahraga Warga Solo (Powarso).

Narasumber yang digunakan pada edisi 2 September 2018 yaitu Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Hilmi Ahmad Saktillah. Berikut kutipannya:

Memang ada wacana, Ketua PAC NU se Solo Raya akan membuat surat pernyataan menolak kegiatan jalan sehat tersebut dan akan ditandatangani semua Ketua PAC NU se Solo Raya. Surat tersebut akan dikirimkan ke Bupati, Komandan Kodim (Dandim) dan Kapolres se Solo Raya,” paparnya. (2 September 2018).

Memang sekarang ini era demokrasi, tapi seharusnya sebagai tamu mereka harusnya empati, kalau mereka ditolak oleh masyarakat, tetapi tetap memaksa, dipastikan akan memunculkan keresahan. Apalagi, di tempat dan waktu yang sama, akan ada kegiatan tahunan Pemerintah

**kota Solo yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Warga Solo (Porwaso).
(2 September 2018).**

Kutipan pertama di atas ingin memberikan informasi perihal pihak-pihak mana saja yang nantinya akan menerima surat penolakan terhadap adanya kegiatan gerak jalan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua PACNU se Solo Raya. Kemudian, kutipan kedua lebih mengajak kepada pihak panitia gerak jalan sehat untuk lebih bersikap kooperatif terhadap keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang menolak kegiatan tersebut sehingga tidak menimbulkan aksi pro dan kontra yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Sementara itu, pada kutipan edisi 6 September 2018 hampir sama dengan edisi sebelumnya yaitu perihal surat penolakan terhadap gerak jalan sehat tersebut. Akan tetapi, pihak yang disebutkan berbeda dengan edisi sebelumnya. Berikut kutipannya:

Saya sudah menerima surat dari Walikota Solo Terkait dengan digelarnya kegiatan Haornas di Lapangan Barat Solo,” jelas Kapolda sambil menyinggung pihaknya telah mengirimkan surat kepada panitia jalan sehat. Adapun isinya kegiatan itu tidak diberikan izin dengan alasan kamtibmas. (6 September 2018)

Kutipan di atas lebih memberikan gambaran sejauh mana surat penolakan yang dibuat Walikota Solo tersebut tersampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan, mulai dari pihak Polda Jateng itu sendiri sampai kepada pihak panitia penyelenggara kegiatan

gerak jalan sehat tersebut. Kutipan di atas disampaikan secara langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono.

Penutup edisi 2 September 2018 yang merupakan pernyataan dari Hilmi Ahmad yang berisi himbauan terhadap kegiatan gerak jalan sehat yang akan diselenggarakan. Himbauan tersebut lebih kepada bagaimana kegiatan tersebut tetap fokus pada jalurnya yaitu kegiatan jalan sehat dan tidak dikaitkan dengan kegiatan lainnya seperti menuntut hak-hak masyarakat ataupun hal-hal yang bermuatan politik. Dituliskan dalam berita dengan kalimat sebagai berikut:

Hilmi Ahmad menambahkan seharusnya kalau memang akan olahraga gerak jalan sehat, yah olahraga saja jangan dicampuradukan dengan menuntut macam-macam. (2 September 2018).

Selanjutnya penutup pada edisi 6 September 2018 merupakan pernyataan Kapolda Jateng yang memberikan penegasan kembali terhadap diselenggarakannya kegiatan Haornas tersebut. Dan menyinggung soal izin yang tidak diberikan kepada pihak panitia penyelenggara jalan sehat. Berikut kalimatnya :

Menurut Kapolda pada acara Haornas nanti dihadirkan para pahlawan Asian Games peroleh medali emas berasal dari Jawa Tengah. Apabila pihak panitia, meski tidak mengantoni izin, tetap menggelar gerak jalan menghadirkan artis Neno Warisman dan Ahmad Dhani, pihaknya akan bertindak tegas membubarkannya. (6 September 2018).

Penutup diatas menjadi penegasan kembali terhadap penolakan kegiatan gerak jalan sehat yang akan diadakan nanti. Adanya ancaman pembubaran apabila pihak panitia tetap menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan tidak mengantongi izin, seolah menjadi pertanda bahwa memang Kapolda Jateng tidak menginginkan adanya kegiatan tersebut.

Skrip, unsur skrip yang ditonjolkan pada kedua berita adalah unsur *what*, *who*, dan *why*. Sebagian besar isi berita yang dijelaskan sesuai dengan judul *headline* yang ditampilkan oleh kedua berita tersebut. Pada berita edisi 2 September 2018 dengan judul “Rencana Kegiatan Jalan Sehat di SOLO” selain itu ada penambahan sub judul yang diberikan yaitu “Ditolak Oleh Sejumlah Elemen Masyarakat” dengan bentuk huruf yang lebih besar dan tebal. Kedaulatan Rakyat menampilkan narasumber dari salah satu pemuka agama yang berpengaruh yaitu Ketua PCNU Hilmi Ahmad Sakdillah yang dimana pendapat yang disampaikan berkaitan dengan penolakan terhadap kegiatan gerak jalan tersebut. Kemudian pada edisi 6 September dengan judul “Polda Jateng Tak Beri Izin” dan sub judul yang diberikan “Gerak Jalan ‘Neno’ di Solo”, secara keseluruhan isi berita dengan judul *headline* selaras artinya tidak keluar dari topik utama yang diangkat. Narasumber yang digunakan pun merupakan pihak yang menolak kegiatan gerak jalan sehat yaitu Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono dengan menyatakan alasan-alasan kenapa kegiatan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak Polda Jateng.

Tematik, tema yang digunakan oleh kedua berita tersebut adalah bagaimana gambaran penolakan berbagai pihak terhadap gerak jalan sehat yang mengandung muatan politik, yang nantinya berdampak buruk terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Didalam berita edisi 2 September 2018 terdapat unsur koherensi yang akhirnya memperkuat tema tersebut. Berikut kalimatnya :

Seperti diketahui, rencananya aksi jalan sehat akan digelar sejumlah elemen masyarakat Solo pada minggu (9/9) mendatang di Lapangan Kota Barat Solo. Namun jalan sehat tersebut dianggap bermuatan politisi dengan indikasi adanya tokoh dari luar Solo seperti Neno Warisman dan Ahmad Dhani (2 September 2018).

Di sisi lain akan digelar tuntutan kepada pemerintah untuk turunkan harga bahan bakar minyak (BBM), turunkan tarif listrik, dan turunkan Sembilan bahan pokok (sembako) (2 September 2018).

Pembahasan mengenai gerak jalan yang bermuatan politik dan adanya tuntutan-tuntutan yang nantinya akan disampaikan dalam kegiatan gerak jalan tersebut seakan memberikan fakta yang kuat terhadap isi berita yang disampaikan diikuti dengan kata sambung yang mempertegas fakta tersebut. Sedangkan pada edisi 6 September 2018 terdapat unsur detail yang isinya alasan kenapa penolakan tersebut dilakukan dan penjelasan soal bagaimana proses penolakan terhadap gerak jalan sehat tersebut. Berikut kalimatnya:

Menurut Kapolda, tidak dikeluarkannya izin itu dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Di antaranya, karena selain gerak jalan yang merupakan keramaian umum bersifat hiburan, olahraga dan kebudayaan yang oleh panitia akan diisi orasi politik dan secara kebetulan lapangan tersebut pada hari yang sama dilangsungkan kegiatan Pekan Olahraga Warga Solo (Porwaso) sebagai bagian dari peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) (6 September 2018)

“Saya sudah menerima surat dari Walikota Solo terkait dengan digelarnya kegiatan Haornas di Lapangan Barat Solo”, jelas Kapolda sambil menyinggung pihaknya telah mengirimkan surat kepada panitia jalan sehat. Adapun isinya kegiatan itu tidak diberikan izin dengan alasan kamtibmas (6 September 2018).

Isi berita di atas menjadi sebuah penjelasan secara detail terhadap topik yang disampaikan oleh Kedaulatan Rakyat edisi 6 September 2018 yang tentunya berkaitan dengan penolakan gerak jalan sehat di Solo.

Struktur **retoris** pada *frame* kali ini menggunakan unsur leksikon dalam memberikan gambaran perihal dampak yang ditimbulkan karena adanya kegiatan gerak jalan sehat yang bermuatan politik seperti disebutkan dalam isi berita edisi 2 September 2018, berikut kalimatnya:

Menurut Hilmi Ahmad Sakdillah berdasarkan informasi yang diterimanya seperti di Surabaya dan Riau, kota yang didatangi dua tamu itu justru **kurang produktif** menimbulkan pro dan kontra (2 September 2018).

Penggunaan leksikon kali ini seakan menunjukkan bahwa kedua kota tersebut tidak menimbulkan pro dan kontra terkait kegiatan gerak jalan sehat bermuatan politik yang diadakan di kota tersebut. Selain itu juga, terdapat leksikon dibagian penutup berita edisi kali ini yang membahas bagaimana sepatutnya kegiatan olahraga yang akan diselenggarakan tidak dibarengi dengan kegiatan lainnya apalagi berkaitan dengan kegiatan politik yang jelas itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan olahraga. Berikut kalimatnya:

Hilmi Ahmad menambahkan seharusnya kalau memang akan olahraga gerak jalan sehat, ya olahraga saja jangan **dicampuradukkan** dengan menuntut macam-macam (2 September 2018).

Sedangkan pada edisi 6 September 2018 Kedaulatan Rakyat menggunakan unsur leksikon dalam membahas hal yang berkaitan dengan alasan kenapa kegiatan gerak jalan sehat di Solo tidak mendapatkan izin dari Polda Jateng. Berikut kalimatnya:

Saya sudah menerima surat dari Walikota Solo Terkait dengan digelarnya kegiatan Haornas di Lapangan Barat Solo,” jelas Kapolda sambil **menyinggung** pihaknya telah mengirimkan surat kepada panitia jalan sehat.

Adapun isinya kegiatan itu tidak diberikan izin dengan alasan kamtibmas (6 September 2018).

Leksikon yang digunakan pada kalimat di atas merupakan penonjolan terhadap isi kalimat yang disampaikan yaitu menyangkut hasil laporan perizinan kegiatan gerak jalan sehat yang dimana pihak Polda Jateng tidak memberikan izin kepada kegiatan tersebut karena alasan keamanan dan ketertiban masyarakat.

II. Frame: Perbedaan Pendapat Antara Mahfud MD dan Gerakan

#2019gantipresiden

Tabel 3.13 STRUKTUR SINTAKTIS

No	Terbit	Headline (Judul)
1	Kamis, 6 September 2018	'KASUS MALANG' BISA TERULANG Jika Eks Napi Korupsi Jadi Wakil Rakyat
Lead		
1	Kamis, 6 September 2018	Keikutsertaan Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu) mengatur mantan napi korupsi menjadi caleg, dinilai membuat suasana kacau. Karena partai politi (parpol) yang sudah mengikuti aturan peraturan kpu 20/2018 menjadi tidak taat.
Latar Informasi		
1	Kamis, 6 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> Jika larangan itu dikaitkan hak asasi manusia (HAM), bisa dikatakan tidak pas. Sebab, sebagai warga, HAM-nya sudah digunakan saat menjabat yang dulu dan kemudian tidak amanah. Bahkan bisa dikatakan, caleg mantan napi merusak integritas pemilu. Bila sampai lolos, 'kasus Malang' bisa terulang lagi di masa mendatang.

		<ul style="list-style-type: none"> • Sebelumnya, Mahfud MD curhat kepada mahasiswa, saat diminta membuat testimoni gerakan #2019gantipresiden. “Belum saya hapus, WA tanggal 28 Maret lalu saya dihubungi untuk membuat dukungan atau penjelasan. Waktu itu langsung saya jawab tidak setuju. Saya menyanggupi jika hastag2019 sudah menjadi #2019pemilihanpresiden,” jelasnya. Alasannya, dalam pemilihan tersebut bisa mengganti, namun juga bisa tidak mengganti.
Kutipan, Sumber, Pernyataan		
1	Kamis, 6 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> • “Meski UU tidak melarang, secara moral, mantan napi koruptor tidak layak menjadi caleg,” tandas Mahfud. • Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar mengingatkan agar tidak menggunakan alasan hak untuk menerima mantan napi korupsi. “Hak itu sudah diberikan dulu, tapi dia tidak amanah menjalankan hak yang diberikan tersebut. Jadi hak itu sudah habis. Jangan lagi berkilah dengan atas nama hak,” tegas Artidjo. • Sebelumnya, Mahfud MD curhat kepada mahasiswa, saat diminta membuat testimoni gerakan #2019gantipresiden. “Belum saya hapus, WA tanggal 28 Maret lalu saya dihubungi untuk membuat dukungan atau penjelasan. Waktu itu langsung saya jawab tidak setuju. Saya menyanggupi jika hastag2019 sudah menjadi #2019pemilihanpresiden,” jelasnya. Alasannya, dalam pemilihan tersebut bisa mengganti, namun juga bisa tidak mengganti.
Penutup		
1	Kamis, 6 September 2018	Pancasila menurut Sultan sebagai ideologi terbuka memiliki dua dimensi lain, ideal dan aktual. Namun kini dipengaruhi nilai-nilai neoliberalisme yang bersamaan globalisasi informasi juga ditumpangi <i>free-rider</i> paham radikalisme agama yang menarik ke ranah politik

Frame pada berita edisi kali ini adalah berkaitan dengan larangan terhadap mantan napi korupsi untuk ikut kembali menjadi wakil rakyat. Adanya pro dan kontra terhadap hal tersebut membuat suasana menjadi kacau terlebih keikutsertaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengatur mantan korupsi menjadi caleg, yang pada akhirnya larangan tersebut dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) yang dirasa oleh sebagian kalangan tidak pas apabila hal tersebut dijadikan alasan. Selain itu, dalam *frame* tersebut juga dijelaskan bagaimana Mahfud MD menolak gerakan #2019gantipresiden karena adanya perbedaan pendapat diantara keduanya.

Headline yang digunakan Kedaulatan Rakyat pada edisi 6 September 2018 seakan memberikan gambaran apa yang akan terjadi apabila eks napi korupsi tetap menjadi wakil rakyat, dimana kasus malang menjadi contoh yang kongkrit apabila hal tersebut dilakukan. Dari judul *headline* yang ditampilkan seakan bahwa Kedaulatan Rakyat dalam edisi kali ini seakan tidak setuju dengan diberlakukannya eks napi menjadi wakil rakyat. Penggunaan judul *headline* dengan huruf kapital dan sub judul dengan huruf tebal yang semakin memberikan kesan tegas terhadap judul *headline* yang dibuat oleh Kedaulatan Rakyat pada edisi kali ini.

Lead yang digunakan dalam edisi kali ini berkaitan dengan keikutsertaan Bawaslu dalam mengatur mantan korupsi menjadi caleg yang oleh sebagian kalangan dianggap membuat keadaan semakin kacau. Berikut kalimatnya:

Keikutsertaan Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu) mengatur mantan napi korupsi menjadi caleg, dinilai membuat suanasa kacau. Karena partai

politik (parpol) yang sudah mengikuti aturan peraturan KPU 20/2018 menjadi tidak taat.

Lead di atas bercerita soal bagaimana suasana yang ditimbulkan oleh keikutsertaan Bawaslu dalam mengatur mantan napi korupsi menjadi caleg. Di situ juga dijelaskan bagaimana sikap parpol yang seakan tidak mengindahkan peraturan yang diberlakukan oleh pihak KPU.

Selanjutnya, **latar informasi** yang terdapat di dalam berita Kedaulatan Rakyat edisi 6 September 2018 kali ini adalah lebih kepada menjelaskan bagaimana larangan terhadap mantan korupsi menjadi caleg yang dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM). Berikut latar informasinya:

Jika larangan itu dikaitkan hak asasi manusia (HAM), bisa dikatakan tidak pas. Sebab, sebagai warga, HAM-nya sudah digunakan saat menjabat yang dulu dan kemudian tidak amanah. Bahkan bisa dikatakan, caleg mantan napi merusak integritas pemilu. Bila sampai lolos, ‘kasus Malang’ bisa terulang lagi di masa mendatang.

Latar informasi di atas jelas memberikan informasi apa yang akan terjadi apabila mantan napi korupsi dibiarkan menjadi caleg, dimana integritas pemilu dipertaruhkan di dalamnya. Sangat tidak pas apabila mantan napi korupsi yang tidak terima dengan adanya pelarangan itu yang akhirnya dikaitkan dengan HAM yang mereka miliki. Padahal HAM yang mereka miliki sebelumnya ketika mereka menjabat

tidak digunakan dengan baik atau tidak amanah. Yang pada akhirnya terkesan aneh apabila para napi korupsi ini menggunakan HAM untuk dijadikan sebuah alasan menolak adanya pelarangan mereka untuk menjadi wakil rakyat. Selain itu juga terdapat latar informasi yang merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD terkait pendapatnya tentang aksi #2019gantipresiden. Berikut kalimatnya:

Sebelumnya, Mahfud MD curhat kepada mahasiswa, saat diminta membuat testimoni gerakan #2019gantipresiden. “Belum saya hapus, WA tanggal 28 Maret lalu saya dihubungi untuk membuat dukungan atau penjelasan. Waktu itu langsung saya jawab tidak setuju. Saya menyanggapi jika hastag2019 sudah menjadi #2019pemilihanpresiden,” jelasnya. Alasannya, dalam pemilihan tersebut bisa mengganti, namun juga bisa tidak mengganti.

Frame pada berita Kedaulatan Rakyat edisi 6 September 2018 menggunakan **narasumber** yang dimana setiap pernyataan yang disampaikannya semakin mempertegas isi dari berita edisi kali ini. Berikut narasumber yang digunakan:

“Meski UU tidak melarang, secara moral, mantan napi koruptor tidak layak menjadi caleg,” tandas Mahfud.

Pernyataan di atas merupakan kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam dialog kebangsaan di

Auditorium Kahar Muzakkir UII jalan Kaliurang Ngaglik Sleman dengan tema 'Indonesia Merdeka, Indonesia Beradab'.

Selain itu juga Agung Artidjo Alkostar Mantan Hakim memberikan pendapat perihal larangan eks nabi yang menjadi wakil rakyat. Berikut pendapatnya:

Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar mengingatkan agar tidak menggunakan alasan hak untuk menerima mantan nabi korupsi. "Hak itu sudah diberikan dulu, tapi dia tidak amanah menjalankan hak yang diberikan tersebut. Jadi hak itu sudah habis. Jangan lagi berkilah dengan atas nama hak," tegas Artidjo.

Pendapat Agung seakan memberikan gambaran bahwa beliau juga tidak setuju dengan adanya mantan nabi yang menjadi wakil rakyat apalagi sampai dikaitkan dengan hak asasi manusia. Seperti dijelaskan di atas bahwa hak yang dulu pernah diberikan seperti disia-siakan karena tidak amanah dalam menjalankan haknya tersebut. Seperti tidak ingin kecolongan untuk kedua kalinya yang akhirnya hak tersebut tidak pantas diberikan kembali kepada mantan nabi korupsi yang ingin menjadi wakil rakyat. Selain itu Mahfud MD juga sedikit menyinggung soal gerakan #2019gantipresiden, beliau bercerita pernah ditawari untuk ikut serta mendukung gerakan tersebut tapi beliau menolaknya karena tidak sesuai dengan apa yang beliau mau. Mahfud MD juga disuruh untuk memberikan sebuah testimoni perihal gerakan #2019gantipresiden. Berikut kalimatnya:

Sebelumnya, Mahfud MD curhat kepada mahasiswa, saat diminta membuat testimoni gerakan #2019gantipresiden. “Belum saya hapus, WA tanggal 28 Maret lalu saya dihubungi untuk membuat dukungan atau penjelasan. Waktu itu langsung saya jawab tidak setuju. Saya menyanggapi jika hastag2019 sudah menjadi #2019pemilihanpresiden,” jelasnya. Alasannya, dalam pemilihan tersebut bisa mengganti, namun juga bisa tidak mengganti.

Penutup yang digunakan merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang memiliki dua dimensi nilai yaitu ideal dan actual. Berikut penutup yang dituliskan oleh Kedaulatan Rakyat pada edisi kali ini:

Pancasila menurut Sultan sebagai ideologi terbuka memiliki dua dimensi lain, ideal dan actual. Namun kini dipengaruhi nilai-nilai neoliberalisme yang bersamaan globalisasi informasi juga ditumpangi *free-rider* paham radikalisme agama yang menarik ke ranah politik.

Penutup seakan keluar dari judul *headline* yang dibuat yang berkaitan dengan mantan napi korupsi yang menjadi wakil rakyat.

Selanjutnya **skrip**, dalam *frame* kali ini Kedaulatan Rakyat menggunakan unsur *what*, *who* dan *how*. Dalam berita edisi 6 September 2018 Kedaulatan Rakyat bercerita soal bagaimana larangan mantan napi korupsi untuk kembali menjadi wakil rakyat. Dijelaskan bahwa memang secara UU tidak melarang mantan napi korupsi menjabar

sebagai wakil rakyat akan tetapi secara moral hal tersebut tidak dibenarkan. Selain itu, berita kali ini menyinggung soal penolakan Mahfud MD terhadap dukungannya kepada aksi #2019gantipresiden karena alasan perbedaan pendapat. Narasumber yang digunakan dalam berita kali ini adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD, mantan Hakim Agung Artidjo Alkotsar dan pakar Politik Azyumardi Azra, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Budayawan Zawawi Imron. *Frame* kali juga dijelaskan bagaimana mantan napi korupsi menggunakan alasan yang berkaitan dengan HAM yang mereka miliki untuk bisa ikut serta kembali dalam ajang pemilihan legislatif, akan tetapi pihak yang menolak hal tersebut merasa bahwa alasan tersebut tidak masuk akal.

Tema yang diangkat oleh Kedaulatan Rakyat edisi kali ini adalah tentang larangan eks napi korupsi yang ingin menjadi wakil rakyat. Adanya pro dan kontra terhadap pelarangan tersebut membuat polemik antara pihak yang menolak larangan tersebut yaitu eks napi korupsi dan pihak-pihak yang melakukan pelarangan tersebut, yang akhirnya pihak eks napi korupsi membuat alasan untuk menolak pelarangan tersebut dengan mengandalkan hak asasi manusia yang mereka miliki. Secara UU memang tidak ada aturan yang melarang eks napi korupsi untuk kembali menjadi wakil rakyat, akan tetapi hal tersebut kurang pantas secara moral, apalagi sampai dikaitkan dengan hak asasi manusia jelas itu akan menjadi hal yang sia-sia karna HAM yang sebelumnya dimiliki oleh eks napi korupsi tersebut tidak digunakan dengan baik. Integritas pemilu seakan dipertaruhkan menjadi terkait polemik yang terjadi soal eks napi korupsi

menjadi wakil rakyat tersebut. Selain itu juga dalam *frame* kali ini Kedaulatan Rakyat sedikit menyinggung soal aksi gerakan #2019gantipresiden dalam bentuk pernyataan yang disampaikan langsung oleh Mahfud MD. Untuk menguatkan tema yang digunakan dalam *frame* berita kali ini, Kedaulatan Rakyat menggunakan unsur korehensi yang terdapat pada kalimat:

Oleh karena itu, Bawaslu tidak bisa ikut campur penyelesaian masalah ini menjadi kewenangan MA, bukan Bawaslu.

Ia menilai, kalau caleg sudah rusak integritasnya, akan ada kasus-kasus seperti DPRD malang. ini jangan sampai terulang. Kalau masih lolos, Indonesia tidak akan pernah bersih dari korupsi.

Alasannya, dalam pemilihan tersebut bisa mengganti, namun juga bisa tidak mengganti, namun juga bisa tidak mengganti

Sementara pakar politik Azyumardi Azra menilai adanya pelanggaran karena ada cawapres yang diperkenalkan pejabat publik ke kampus-kampus. Menurutnya hal tersebut termasuk pelanggaran karen mencuri start kampanye.

Kemudian **retoris** yang digunakan dalam berita edisi kali adalah unsur leksikon yang menampilkan pernyataan mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar. Berikut kalimatnya

“Hak itu sudah diberikan dulu, tapi dia tidak amanah menjalankan hak yang diberikan tersebut. Jadi hak itu sudah habis. Jangan lagi **berkilah** dengan atas nama hak,” tegas Artidjo.

Penggunaan kata **berkilah** pada pernyataan di atas ditujukan kepada eks napi korupsi yang ingin menjabat sebagai wakil rakyat, penggunaan kata **berkilah** seakan menggambarkan bagaimana mantan napi korupsi tersebut seakan ingin mencari-cari alasan terhadap pelarangannya untuk kembali menjadi wakil rakyat yang kemudian hak asasi manusia menjadi alasan yang menurut mereka tepat. Selain itu unsur grafis juga ditampilkan dalam berita edisi kali ini dalam bentuk foto, dimana dalam foto tersebut terlihat Dr. Artidjo Alkostar. SH. MH, Prof. Dr. Moh Mahfud MD dan Direktur CNN Indonesia Alfito Deannova Gintings sedang berdialog diacara kebangsaan di Universitas Islam Indonesia (UII), Rabu (5/8) di Auditorium Kahar Muzakkir UII jalan Kaliurang, Ngaglik, Sleman.

C. Analisis Framing Surat Kabar Harian Republika

I. Frame: Konflik antar tagar pendukung capres tidak mencerminkan keakraban.

Tabel 3.14 STRUKTUR SINTAKTIS

No	Terbit	Headline (Judul)
1	Kamis, 30 Agustus 2018	Asian Games Yang Menyejukkan
Lead		
1	Kamis, 30 Agustus 2018	Hanifan Yudani Kusuma, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto menjadi bahan pembicaraan

		publik. Tiga nama tersebut mendapat perhatian luas masyarakat setelah ketiganya saling berangkul se usai pertandingan final cabang olahraga pencak silat Asian Games 2018 yang digelar di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Rabu (29/8).
Latar Informasi		
1	Kamis, 30 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> Kejadian itu menjadi istimewa karena saling rangkul ini langka terjadi dan sarat akan makna. Bermula ketika Hanifan atlet pencak silat Indonesia dipanggil ke podium VVIP setelah berhasil mengalahkan atlet silat asal Vietnam, Nguyen Thai Linh, di partai final nomor C putra. Kendati masa kampanye belum dimulai, massa kedua kubu sudah mempromosikan pasangan capres-cawapres mereka. Kubu Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang menyosialisasikan tagar Jokowi Dua Periode, sedangkan kubu Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno mengusung tagar 2019 ganti presiden.
Kutipan, Sumber, Pernyataan		
1	Kamis, 30 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> Sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi. "Saya hadir di sini untuk menyemangati dan memberikan selamat kepada teman baik saya, Pak Prabowo." "Kita bangga bisa berperan, bisa berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa. Kalau sudah untuk negara dan bangsa, kita bersatu, tidak ada perbedaan," kata Prabowo.
Penutup		
1	Kamis, 30 Agustus 2018	Hanya di Asian Games, semangat persatuan dan kesatuan ini menemukan momentumnya. Asian Games yang menyejukkan. Mari jaga terus spirit ini kendati Asian Games selesai dihelat.

Frame dalam berita edisi 30 Agustus 2018 berkaitan dengan bagaimana situasi konflik yang terjadi antar pendukung masing-masing capres dalam bentuk dukungan tagar yaitu #Jokowi2periode dan #2019gantipresiden, dimana konflik tersebut seakan tidak mencerminkan keakraban yang dilakukan oleh capresnya. Akhirnya gerakan tagar tersebut seakan dianggap sebagai gerakan yang menimbulkan kericuhan yang merugikan masyarakat umum dan tidak mencerminkan keakraban yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto di ajang Asian Games.

Headline dalam berita kali ini yang berjudul “ Asian Games Yang Menyejukkan” seakan menggambarkan bagaimana suasana yang terjadi ketika perhelatan Asian Games dilangsungkan. Apabila dibaca isi beritanya, Republika ingin menceritakan keakraban antara dua tokoh yang sedang bersaing dalam pemilihan presiden 2019 nanti yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dimana keakraban tersebut terjadi di dalam perhelatan Asian Games tepatnya ketika merayakan kemenangan Hanifan Yudani Kusuma dicabang olahraga pencak silat setelah mengalahkan Nguyen Thai Linh di partai final nomor kelas C putra. Momen keakraban tersebut oleh Republika dikaitkan dengan suasana konflik yang terjadi dikalangan para pendukung masing-masing capres dalam bentuk gerakan tagar seperti #Jokowi2periode untuk pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan #2019gantipresiden untuk pendukung Prabowo-Sandiaga Salahudin Uno.

Lead yang disampaikan Republika dalam edisi 30 Agustus 2018 kali ini menceritakan siapa tokoh yang sedang hangat diperbincangkan dikalangan masyarakat

terkait keakraban yang mereka lakukan, disaat suasana ketegangan menjelang pemilihan presiden 2019 keakraban para tokoh tersebut seakan memberikan angin segar yang menciptakan suasana yang sejuk. Tokoh yang dimaksud dalam berita kali ini adalah Hanifan Yudani Kusuma, Presiden Joko Widodo, dan Prabowo Subianto.

Berikut kalimatnya:

Hanifan Yudani Kusuma, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto menjadi bahan pembicaraan publik. Tiga nama tersebut mendapatkan perhatian luas masyarakat setelah ketiganya saling berangkulan se usai pertandingan final cabang olahraga pencak silat Asian Games 2018 yang digelar di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Rabu (29/8)

Lead di atas sedikit juga memberikan gambaran dari bentuk keakraban apa yang dimaksudkan, yang akhirnya hal tersebut juga seakan menjadi penjelasan terhadap judul *headline* yang dibuat dalam berita edisi kali ini.

Berita dalam Republika edisi 30 September 2018 menggunakan **latar informasi** yang menggambarkan sedikitnya bagaimana proses terjadinya keakraban antara Hanifan, Jokowi dan Prabowo. Berikut kalimatnya:

Kejadian itu menjadi istimewa karena saling rangkul ini langka terjadi dan sarat makna. Bermula ketika Hanifan atlet pencak silat Indonesia

dipanggil ke podium VVIP setelah berhasil mengalahkan atlet silat asal Vietnam, Nguyen Thai Linh, di partai final nomor C putra.

Selain itu terdapat pula latar informasi yang membahas tentang belum dimulainya masa kampanye, akan tetapi massa pendukung masing-masing capres dalam bentuk tagar pendukung sudah banyak melakukan promosi untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Berikut kalimatnya:

Kendati masa kampanye belum dimulai, massa kedua kubu sudah mempromosikan pasangan capres-cawapres mereka. Kubu Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang menyosialisasikan tagar Jokowi Dua Periode, sedangkan kubu Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno mengung tagar 2019 ganti presiden.

Adanya latar informasi tersebut seakan memberikan pernyataan bahwa ada pelanggaran yang terjadi perihal kampanye yang dilakukan karena tidak dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Pelanggaran yang terjadi akhirnya menjadi penonjolan dalam berita kali ini berkaitan dengan pendukung tagar masing-masing capres.

Dalam *frame* kali ini Republika edisi 30 Agustus 2018 menggunakan **narasumber** sebagai penegasan terhadap judul *headline* yang disajikan, narasumber yang diambil adalah pernyataan yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Berikut kalimatnya:

Sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi. “Saya hadir di sini untuk menyemangati dan memberikan selamat kepada teman baik saya, Pak Prabowo.”

“Kita bangga bisa berperan, bisa berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa. Kalau sudah untuk negara dan bangsa, kita bersatu, tidak ada perbedaan,” kata Prabowo.

Kutipan pertama di atas seakan menggambarkan keakraban Presiden Jokowi dan itu jelas terlihat dari bagaimana sapaan yang dia berikan kepada lawan politiknya tersebut yaitu Prabowo Subianto. Selanjutnya kutipan kedua lebih kepada ungkapan perasaan Prabowo terhadap apa yang sudah dicapai oleh Indonesia di ajang perhelatan Asian Games 2018 tersebut.

Penutup dalam edisi kali ini Republika seakan tetap konsisten dengan judul *headline* yang ditampilkan, meskipun ada sedikit hal yang dikaitkan dengan gerakan tagar pendukung capres. Penutup lebih kepada mengajak masyarakat agar tetap menjaga persatuan yang tercipta karena adanya perhelatan Asian Games tersebut. Berikut kalimat penutup:

Hanya di Asian Games, semangat persatuan dan kesatuan ini menemukan momentumnya. Asian Games yang menyejukkan. Mari jaga terus spirit ini kendati Asian Games selesai dihelat.

Dalam edisi kali ini Republika seakan tidak ingin terlalu keluar dari topik pembahasan utama yaitu berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya perhelatan Asian Games tersebut. Sisi positif yang ditimbulkannya pun secara keseluruhan menjadi isi dalam berita kali ini yang akhirnya dikaitkan dengan konteks yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Asian Games itu sendiri, yaitu bagaimana situasi yang ditimbulkan dengan adanya dukungan terhadap capres dalam bentuk dukungan tagar. Banyaknya gesekan antar pendukung tersebut yang akhirnya berbanding terbalik dengan keakraban yang diperlihatkan oleh capres yang mereka dukung.

Skrip yang digunakan dalam berita edisi kali ini adalah *what, who, dan how*. Berita kali ini banyak menonjolkan dampak yang ditimbulkan dari adanya perhelatan Asian Games dimana salah satunya adalah momen keakraban antara Presiden Jokowi dan Prabowo yang saat ini bersaing dalam pemilihan presiden 2019 nanti. Keakraban tersebut pun ditekankan dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan langsung oleh kedua tokoh yang sedang bersaing dalam politik tersebut. Bagaimana proses terjadinya momen tersebut pun seakan banyak ditampilkan dalam berita edisi kali ini. Selain itu juga terdapat penjelasan tentang bagaimana keakraban tersebut dikaitkan dengan gerakan tagar pendukung masing-masing capres.

Tematik, tema yang digunakan dalam berita edisi kali ini adalah bagaimana Asian Games dapat menciptakan keakraban antara dua tokoh yang saling berselisih dalam ajang pemilihan presiden 2019 yaitu Presiden Joko Widodo dan Prabowo

Subianto yang pada akhirnya membuat kesejukan politik dimana sebelumnya sempat mengalami ketegangan. Dan bagaimana keakraban tersebut seakan tidak dibarengi dengan keakraban para pendukungnya dalam bentuk gerakan tagar pendukung capres yang jauh dari kata akrab dan cenderung menimbulkan konflik antar pendukung masing-masing pendukung capres. Adanya unsur detail yang semakin membuat pernyataan tersebut semakin kuat. Detail yang dibuat berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya keakraban tersebut Berikut kalimatnya:

Hanifan pun menaiki podium dan menyalami satu per satu tamu kehormatan di sana. Dimulai dengan merangkul Chef De Mission Kontingen Indonesia di Asian Games Komjen Pol Syafruddin, menyalami Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri, memeluk Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyalami yang kemudian dipeluk Presiden Joko Widodo, dan memeluk Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia Prabowo Subianto. Setelah memeluk Prabowo, Hanifan kembali ke arah Presiden Jokowi sembari tangan kirinya merangkul Jokowi dan tangan kanannya menggelayut ke pundak Prabowo.

Selain adanya unsur detail yang sudah dijelaskan di atas, dalam berita kali ini juga terdapat unsur koherensi yang digunakan sebagai penjelasan terhadap kalimat pernyataan yang disampaikan perihal konflik antar pendukung yang banyak terjadi. Berikut kalimatnya:

Energi seolah habis demi ‘memenangkan’ masing-masing kubu dengan berbagai sindiran, ejekan, dan pernyataan bernada perseteruan dan kebencian. Seolah tak lagi mengingat bahwa mereka adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Ironinya**, masa kampanye belumlah dimulai!

Kemudian **retoris**, unsur yang digunakan sebagai penekanan terhadap isi dari pernyataan yang disampaikan adalah leksikon, terlihat bagaimana dalam berita edisi 30 September 2018 terdapat kata “**Seraya berkelakar**” dalam kalimat “**seraya berkelakar**, Jokowi mengaku spontan memeluk balik Hanifan. “Saya tidak tahu, tiba-tiba diajak pelukan. Cuman bau, tapi baunya harum karena (atlet silat Indonesia) menang.”” Pernyataan tersebut merupakan respon dari Presiden Jokowi terhadap apa yang dilakukan oleh Hanifan kepadanya dengan penggunaan leksikon di atas seakan semakin mempertegas apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

II. Frame : Gerakan #2019gantipresiden Harus Sesuai Aturan

Tabel 3.15 STRUKTUR SINTAKTIS

No	Terbit	Headline (Judul)
1	Senin, 3 September 2018	Jokowi: Berpendapat Ada Batasannya
2	Selasa, 4 September 2018	Polri Terbitkan Arahan Deklarasi Polri menilai tiga tagar sebagai kegiatan politik
Lead		
1	Senin, 3 September 2018	Polemik pelarangan deklrasi gerakan #2019gantipresiden beberapa hari terakhir menjadi perhatian semua pihak. Rencana

		deklarasi gerakan yang digagas Mardani Ali Sera di sejumlah daerah dibubarkan oleh kepolisian.
2	Selasa, 4 September 2018	Polri menerbitkan arahan kepada jajaran anggota intelijen dan keamanan di kepolisian satuan wilayah tingkat daerah atau kepolisian daerah (polda) untuk menyikapi sejumlah aksi deklarasi dalam bentuk tagar dalam bentuk tagar calon presiden (capres). Arahan itu diterbitkan dalam bentuk surat telegram bernomor SRT/1852/VIII/2018 dan ditandatangani Kepala Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Komisaris Jendral Lutfi Lubihanto.
Latar Informasi		
1	Senin, 3 September 2018	Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hal itu merupakan kewenangan kepolisian. Menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan di masyarakat.
2	Selasa, 4 September 2018	Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, kegiatan menyampaikan aspirasi dan unjuk rasa memang diatur oleh UU Nomor 9 Tahun 1998. Namun, dalam Pasal 6 berapa poin harus dipedomani oleh setiap orang yang akan menyampaikan aspirasi. Setyo menegaskan, jika salah satu dari lima hal tak terpenuhi, aparat kepolisian berhak untuk membubarkan penyampaian pendapat aspirasi. "Polisi menganggap kalau salah satu tidak terpenuhi bisa terjadi gangguan keamanan dan ketertiban," ujarnya, Senin (3/8).
Kutipan, Sumber, Pernyataan		
1	Senin, 3 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> • "Nanti kalau misalnya polisi enggak melakukan apa-apa, kalau kemudian terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi. Saya kira proses-proses pencegahan seperti itu sudah menjadi tugas aparat," kata Jokowi usai menghadiri acara Pekan Orientasi Caleg Partai Nasdem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (1/9).

		<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia adalah negara demokrasi. Oleh karena itu, warga negara diberikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. “Tapi ingat, ada batasannya, yaitu aturan-aturan,” kata dia.
2	Selasa, 4 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penilaian suatu penyampaian aspirasi dan pendapat, Setyo menuturkan, Polri melihat apakah rentan terjadi konflik atau tidak. Ketika hal tersebut terjadi, polisi bisa mengambil keputusan sesuai dengan Pasal 15, yang isinya adalah Polri dapat membubarkan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. “Kalau tidak mau dibubarkan, dia dikenakan UU pidana Pasal 211 sampai 218,” ujarnya. • Setyo menegaskan, Polri bersikap netral dan tak mendukung salah satu gerakan mendukung capres. Ia mengklaim, Polri hanya melihat jangan sampai deklarasi tagar dukungan menjadi pemicu konflik. Ia pun menuturkan, Polri tidak akan masalah jika salah satu gerakan dukungan capres tidak mendapat penolakan di suatu daerah.
Penutup		
1	Senin, 3 September 2018	“Sebab, Gerakan #2019gantipresiden ini sebenarnya bukan pelanggaran kampanye, tapi pelanggaran keamanan dan ketertiban,” kata dia.
2	Selasa, 4 September 2018	Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berserikat dijamin di negara demokrasi. Namun, ia mengingatkan, kebebasan tersebut tetap ada aturannya.

Frame yang terdapat dalam kedua berita tersebut adalah bagaimana gerakan #2019gantipresiden harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga adanya kemungkinan dampak yang buruk seperti terganggu keamanan dan ketertiban dimasyarakat perihal tidak diberlakukannya aturan tersebut dengan baik.

Headline pada berita Republika edisi 3 September 2018 yang berjudul “Jokowi: Berpendapat Ada Batasan” seakan memberikan sedikit gambaran mengenai kebebasan berpendapat yang dimana kebebasan tersebut tetap pada aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi pelanggaran karena penyampaian pendapat tersebut. Judul merupakan kutipan pendapat yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi, yang akhirnya kutipan tersebut seakan menjadi sebuah penekanan terhadap judul *headline* yang dibuat oleh Republika pada edisi kali ini. Kemudian pada berita kedua yaitu edisi 4 September 2018 yang berjudul “Polri Terbitkan Arahan Deklarasi” juga menunjukkan bagaimana pihak Polri berperan dalam memberikan aturan terhadap kegiatan deklarasi. Adanya sub judul “Polri menilai tiga tagar sebagai kegiatan politik” semakin memberikan penegasan terhadap judul *headline* yang ditampilkan sebelumnya. Polri seakan telah mengambil keputusan terhadap kegiatan tagar yang ada dengan menyampaikan bahwa ketiga tagar yang dimaksud oleh pihak Polri merupakan kegiatan politik.

Lead yang digunakan pada edisi 3 September 2018 sudah menggambarkan bagaimana situasi yang ditimbulkan oleh adanya gerakan #2019gantipresiden yang tentunya tidak berdampak positif bagi masyarakat hingga akhirnya dibubarkan oleh pihak kepolisian. Berikut kalimatnya:

Polemik pelarangan deklarasi gerakan #2019gantipresiden beberapa hari terakhir menjadi perhatian semua pihak. Rencana deklarasi gerakan yang digagas Mardani Ali Sera di sejumlah daerah dibubarkan oleh kepolisian.

Pada *lead* tersebut, Republika lebih berfokus soal bagaimana pihak kepolisian akhirnya membubarkan deklarasi gerakan #2019gantipresiden di sejumlah daerah. Mungkin dalam hal ini Republika ingin menyoroti dampak yang ditimbulkan dari adanya deklarasi tersebut yang akhirnya menimbulkan reaksi yang kurang mengena dari pihak kepolisian. Kemudian *lead* pada berita edisi 4 September 2018 menceritakan bagaimana pihak Polri memberikan arahan terkait sejumlah deklarasi dalam bentuk tagar calon presiden.

Polri menerbitkan arahan kepada jajaran anggota intelijen dan keamanan di kepolisian satuan wilayah tingkat daerah atau kepolisian daerah (polda) untuk menyikapi sejumlah aksi deklarasi dalam bentuk tagar dalam bentuk tagar calon presiden (capres). Arahan itu diterbitkan dalam bentuk surat telegram bernomor SRT/1852/VIII/2018 dan ditandatangani Kepala Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Komisaris Jendral Lutfi Lubihanto.

Secara keseluruhan *lead* di atas lebih kepada memberikan keterangan mengenai telah diterbitkannya arahan terhadap deklarasi gerakan tagar pendukung capres dari pihak polri kepada kepolisian daerah setempat. Jelas bagaimana arahan tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh pihak yang bersangkutan seakan memberikan informasi bahwa arahan tersebut merupakan arahan resmi yang sepatutnya dipatuhi.

Adapun **latar informasi** yang digunakan pada edisi 3 September 2018 merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Pernyataan tersebut

sedikit menjelaskan bahwa deklarasi yang dibubarkan oleh pihak kepolisian merupakan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan di masyarakat dengan penulisan berita sebagai berikut:

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hal itu merupakan kewenangan kepolisian. Menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan di masyarakat.

Presiden Jokowi selaku yang memberikan pernyataan dalam latar informasi di atas, seakan menegaskan isi latar informasi tersebut. Selain itu juga latar informasi yang disampaikan semakin memperkuat *lead* sebelumnya yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan deklarasi gerakan #2019gantipresiden yang akhirnya memicu pembubaran deklarasi tersebut oleh pihak kepolisian. Presiden Jokowi pun secara tidak langsung menganggap bahwa deklarasi gerakan #2019gantipresiden dapat mengancam ketertiban sosial dan keamanan di masyarakat.

Kemudian pada berita edisi 4 September 2018 latar informasi yang digunakan lebih menjelaskan aturan yang diberlakukan untuk mengatur jalannya penyampaian aspirasi dan unjuk rasa. Sebagaimana dikatakan sebagai berikut:

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, kegiatan menyampaikan aspirasi dan unjuk rasa memang diatur oleh UU Nomor 9 Tahun 1998. Namun, dalam Pasal 6 beberapa poin harus dipedomani oleh setiap orang yang akan menyampaikan aspirasi. Setyo menegaskan, jika

salah satu dari lima hal tak terpenuhi, aparat kepolisian berhak untuk membubarkan penyampaian pendapat aspirasi. “Polisi menganggap kalau salah satu tidak terpenuhi bisa terjadi gangguan keamanan dan ketertiban,” ujarnya, Senin (3/8).

Jelas bagaimana aturan yang diberlakukan untuk mengatur aksi deklarasi dalam bentuk tagar pendukung calon presiden. Adanya penegasan kalimat yang menjelaskan bahwa aturan yang diberlakukan harus semuanya terpenuhi apabila salah satunya tidak terpenuhi akan ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan diberlakukannya pembubaran terhadap deklarasi gerakan #2019gantipresiden dimana keamanan dan ketertiban menjadi alasan yang digunakan pihak kepolisian itu sendiri.

Kemudian **kutipan narasumber** yang digunakan dalam edisi 3 September 2019 berkaitan dengan tugas aparat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Berikut kutipannya:

“Nanti kalau misalnya polisi enggak melakukan apa-apa, kalau kemudian terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi. Saya kira proses-proses pencegahan seperti itu sudah menjadi tugas aparat,” kata Jokowi seusai menghadiri acara Pekan Orientasi Caleg Partai Nasdem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (1/9).

Pernyataan di atas seperti pernyataan meledek yang disampaikan secara halus soal bagaimana pihak yang sepatutnya disalahkan apabila terjadi benturan terkait

adanya deklarasi gerakan #2019gantipresiden karena polisi tidak melakukan apa-apa. Selain itu, dalam pernyataannya Jokowi seakan setuju dengan keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian karena bagaimanapun hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kepolisian. Kemudian pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Presiden Jokowi sebagai penegasan terhadap pernyataan sebelumnya. Berikut pernyataannya:

Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia adalah negara demokrasi. Oleh karena itu, warga negara diberikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. “Tapi ingat, ada batasannya, yaitu aturan-aturan,” kata dia.

Penegasan di atas berisi himbauan terhadap masyarakat yang intinya senantiasa taat pada peraturan yang berlaku, meskipun negara kita adalah negara demokrasi yang memiliki kebebasan dalam berpendapat. Penegasan yang disampaikan Presiden Jokowi pun seakan menjadi penguat terhadap pernyataan yang disampaikan sebelumnya. Selain itu Mardani Ali Sera juga memberikan pernyataan, dimana beliau meragukan kebebasan berpendapat yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Berikut kalimatnya:

Di pihak lain, Mardani Ali Sera meragukan kebebasan berpendapat yang diungkapkan Jokowi tersebut. Ia meminta masyarakat menilai sendiri apakah kebebasan berpendapat di Indonesia berkembang dengan baik. “Kami serahkan kepada public untuk menilai adakah demokrasi, khususnya menyampaikan pendapat, berkembang di negeri ini,” kata Mardani.

Narasumber yang digunakan pada berita edisi 4 September 2018 kali ini adalah Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto yang membahas bagaimana prosedur yang dilakukan dalam mengambil keputusan terkait pembubaran pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Dan adanya penegasan pula yang disampaikan, perihal sikap netral Polri terhadap dukungan satu gerakan pendukung capres. Berikut kutipannya:

Dalam penilaian suatu penyampaian aspirasi dan pendapat, Setyo menuturkan, Polri melihat apakah rentan terjadi konflik atau tidak. Ketika hal tersebut terjadi, polisi bisa mengambil keputusan sesuai dengan Pasal 15, yang isinya adalah Polri dapat membubarkan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. “Kalau tidak mau dibubarkan, dia dikenakan UU pidana Pasal 211 sampai 218,” ujarnya.

Setyo menegaskan, Polri bersikap netral dan tak mendukung salah satu gerakan mendukung capres. Ia mengklaim, Polri hanya melihat jangan sampai deklarasi tagar dukungan menjadi pemicu konflik. Ia pun menuturkan, Polri tidak akan masalah jika salah satu gerakan dukungan capres tidak mendapat penolakan di suatu daerah.

Selanjutnya adalah **penutup**, dalam edisi 3 September 2018 Republika memberikan penutup perihal bagaimana gerakan #2019gantipresiden bukan pelanggaran kampanye. Penutup merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Berikut kalimatnya:

“Sebab, Gerakan #2019gantipresiden ini sebenarnya bukan pelanggaran kampanye, tapi pelanggaran keamanan dan ketertiban,” kata dia.

Penutup di atas semacam penegasan bahwa gerakan #2019gantipresiden bukan pelanggaran kampanye, akan tetapi beliau juga seakan menegaskan bahwa apa yang disampaikan Jokowi sebelumnya terkait keamanan dan ketertiban menjadi alasan adanya pembubaran deklarasi gerakan #2019gantipresiden oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, pernyataan Presiden Jokowi yang mengingatkan kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut kalimat penutup yang disampaikan:

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berserikat dijamin di negara demokrasi. Namun, ia mengingatkan, kebebasan tersebut tetap ada aturannya.

Skrip dalam *frame* kali ini menggunakan unsur *what*, *who*, dan *why* khususnya pada berita edisi 3 September 2018. Banyaknya penonjolan terhadap dampak yang diterjadi oleh adanya deklarasi gerakan #2019gantipresiden menjadi topik pembahasan dalam berita kali ini. Selain itu, narasumber yang digunakan pun semakin memperkuat pernyataan-pernyataan yang disampaikan, seperti Presiden Jokowi, Mardani Ali Sera, Farhat Abas selaku Juru Bicara Koalisi Indonesia Kerja pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin (KIK), kemudian Prabowo Subianto. Selanjutnya, ditonjolkan pula soal kenapa deklarasi gerakan #2019gantipresiden selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dengan adanya pembubaran kegiatan tersebut di beberapa daerah. Dalam hal tersebut

Mardani Ali Sera juga seakan mempertanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi padahal secara perizinan sudah diurus sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah dilakukan pemberitahuan sebelumnya perihal akan diadakannya deklarasi gerakan #2019gantipresiden.

Dalam edisi selanjutnya yaitu 4 September 2018 Republika menonjolkan unsur *what*, *who* dan *how* dalam perangkat skripnya. Dalam edisinya kali ini Republika lebih membahas mengenai arahan yang digunakan untuk mengatur aksi deklarasi dalam bentuk tagar calon presiden baik itu #Jokowi2periode atau #2019gantipresiden dan lain sebagainya. Dalam hal narasumber, Republika menggunakan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto sebagai narasumber terpercaya untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya terkait arahan tersebut. Hampir seluruh kutipan yang ada di dalam berita kali ini merupakan pernyataan langsung dari Setyo. Selain itu juga ada pernyataan dari Ketua DPR Bambang Soesatyo yang menilai bahwa #2019gantipresiden tidak boleh disalahkan. Gerakan tagar pendukung tersebut merupakan gerakan menyampaikan aspirasi masyarakat, yang dimana hal tersebut sudah diatur dalam UU yang berlaku. Apabila UU tersebut tidak diindahkan oleh kegiatan gerakan tagar pendukung tersebut pihak kepolisian berhak mengambil keputusan tegas yaitu membubarkan kegiatan tersebut karena berkaitan dengan keamanan dan ketertiba masyarakat.

Dalam *frame* kali ini **tema** yang digunakan oleh kedua berita tersebut adalah bagaimana perlunya aturan yang berlaku untuk mengatur kegiatan gerakan tagar

pendukung capres tersebut. Unsur koherensi yang terdapat dalam edisi 3 September 2018 seakan memberikan penjelasan adanya perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Mardani Ali Sera terkait apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap aksi deklarasi gerakan #2019gantipresiden. Berikut kalimatnya:

Di pihak lain, Mardani Ali Sera meragukan kebebasan berpendapat yang diungkapkan Jokowi tersebut. Ia meminta masyarakat menilai sendiri apakah kebebasan berpendapat di Indonesia berkembang dengan baik. “Kami serahkan kepada public untuk menilai adakah demokrasi, khususnya menyampaikan pendapat, berkembang di negeri ini,” kata Mardani.

“**Sebab**, Gerakan #2019gantipresiden ini sebenarnya bukan pelanggaran kampanye, tapi pelanggaran keamanan dan ketertiban,” kata dia.

Kata **sebab** pada kalimat yang disampaikan oleh Prabowo Subianto di atas juga merupakan sebuah koherensi yang menjadi sebuah penekanan terhadap pendapat yang disampaikannya mengenai gerakan #2019gantipresiden. Selanjutnya pada edisi 4 September 2018 terdapat unsur detail yang menjelaskan bagaimana aturan yang digunakan untuk mengatur aksi deklarasi dalam bentuk tagar pendukung capres. Berikut kalimatnya:

Lima hal itu, pertama, dalam menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Kedua, menghormati aturan-aturan moral yang

diakui umum. Ketiga, mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Kelima, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Retoris yang digunakan dalam *frame* kali ini adalah leksikon dimana unsur tersebut dapat ditemukan di dalam kedua berita tersebut. Seperti pada edisi 3 September 2018 Republika menggunakan idiom sebagai penjelasan kalimat yang disampaikan, idiom tersebut yaitu penggunaan kata '**polemik**', polemik berarti sesuatu yang diperdebatkan, dalam hal ini sesuatu yang diperdebatkan tersebut yaitu soal pelarang deklarasi gerakan #2019gantipresiden yang akhirnya menjadi bahan perbincangan masyarakat umum. Sedangkan pada edisi 4 September 2018 Republika menggunakan kata '**mengklaim**' dalam memberikan pernyataan yang disampaikan oleh pihak Polri yang berkaitan dengan himbuan terhadap aksi deklarasi #2019gantipresiden yang diharapkan tidak menjadi pemicu terjadinya konflik. Republika kali memberikan informasi seakan bahwa pernyataan yang disampaikannya oleh pihak Polri merupakan fakta yang jelas terjadi dengan penggunaan kata mengklaim tersebut.

III. Frame: Bawaslu Harus Netral dan Tidak Berpihak Pada Aksi

#2019gantipresdien

Tabel 3.16 STRUKTUR SINTAKTIS

No	Terbit	Headline (Judul)
1	Sabtu, 8 September 2018	Sikap Bawaslu Disoal Terkait Perang Tagar
Lead		
1	Sabtu, 8 September 2018	Lembaga Badan Hukum Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (LBH Almisbat) melaporkan dua komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Jumat (7/9). Mereka dilaporkan karena dugaan pelanggaran etik terkait aksi dan tagar #2019gantipresdien.
Latar Informasi		
1	Sabtu, 8 September 2018	“Pokok laporan kami adalah pernyataan Fritz Edward dan Rahmat Bagja selaku komisioner Bawaslu yang menyatakan tagar #2019gantipresdien bukan pelanggaran pemilu atau bukan kampanye hitam,” tutur kuasa hukum LBH Almisbat, Adhel Setiawan, di kantor DKPP, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/9).
Kutipan, Sumber, Pernyataan		
1	Sabtu, 8 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Adhel, tokoh-tokoh yang menggerakkan aksi dan tagar tersebut merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam partai politik pendukung calon tertentu. • Sementara itu, komisioner Bawaslu terlapor, Rahmat Bagja, mengatakan, DKPP memiliki kewenangan untuk menilai laporan yang ditujukan kepadanya. Namun demikian, ia mengaku tak setuju jika disebut berpihak pada salah satu gerakan terkait pemilihan pemilihan presiden 2019.
Penutup		

1	Sabtu, 8 September 2018	Koordinator deklarasi, Ahmad Romli Latif, menyaakan setidaknya ada 48 organisasi masyarakat (ormas) dilampung.
---	-------------------------	--

Frame yang ditunjukkan dalam berita edisi kali ini yaitu bagaimana sikap Bawaslu terhadap gerakan #2019gantipresiden seakan memiliki tendensi memihak karena anggota yang mereka resmi dilaporkan oleh LBH Almisbat terkait pernyataan anggota Bawaslu yang menyatakan bahwa tagar #2019gantipresiden bukan pelanggaran pemilu atau bukan kampanye hitam. Perang tagar menjelang kontestasi Pilpres 2019 membuat polarisasi antarkubu pendukung memanas. Dalam edisi ini Republika seakan ingin memperkuat fakta bahwa gerakan #2019gantipresiden benar-benar melanggar aturan kampanye dengan bukti adanya anggota Bawaslu yang memihak gerakan tersebut.

Headline dalam berita edisi 8 September 2018 kali menggunakan judul *headline* “Sikap Bawaslu Soal Terkait Perang Tagar” judul yang digunakan seakan menggambarkan bagaimana sikap yang akan diberikan bawaslu terhadap perang tagar yang sedang terjadi di masyarakat. Dalam isi beritanya, Republika kali ini memilih bercerita mengenai adanya anggota bawaslu yang terlibat kasus yang berkaitan dengan gerakan #2019gantipresiden, dan bagaimana aksi #2019gantipresiden yang diselenggarakan di beberapa daerah berjalan dengan baik tanpa ada sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Lead yang digunakan dalam edisi kali ini berkaitan dengan diketahuinya anggota bawaslu yang terjerat kasus dugaan pelanggaran etik terkait aksi dan tagar #2019gantipresiden. Berikut kalimatnya:

Lembaga Badan Hukum Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (LBH Almisbat) melaporkan dua komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Jumat (7/9). Mereka dilaporkan karena dugaan pelanggaran etik terkait aksi dan tagar #2019gantipresiden.

Lead di atas sekilas menceritakan bagaimana LBH Almisbat mengetahui adanya pelanggaran yang terjadi di dalam Bawaslu, dimana dua dari anggota Bawaslu tersebut terlibat kasus yang akhirnya membuat pihak LBH Almisbat melaporkan hal tersebut. Kasus tersebut berkaitan dengan pelanggaran etik terkait aksi dan gerakan #2019gantipresiden. Sikap tidak netral yang diperlihatkan oleh kedua anggota Bawaslu tersebut jelas seakan memberikan citra buruk terhadap Bawaslu itu sendiri.

Latar informasi dalam berita edisi 8 September 2018 kali ini berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kuasa hukum LBH Almisbat Adhel Setiawan terkait laporannya perihal keterlibatan dua anggota Bawaslu dalam pelanggaran etik. Berikut kalimatnya:

“Pokok laporan kami adalah pernyataan Fritz Edward dan Rahmat Bagja selaku komisioner Bawaslu yang menyatakan tagar

#2019gantipresiden bukan pelanggaran pemilu atau bukan kampanye hitam,” tutur kuasa hukum LBH Almisbat, Adhel Setiawan, di kantor DKPP, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/9).

Latar informasi yang diberikan seakan menjadi penjelasan terhadap kalimat sebelumnya. Disebutkan bahwa dua anggota Bawaslu yang terlibat adalah Fritz Edward dan Rahmat Bagja, keduanya seakan memberikan pernyataan dukungan terhadap aksi tagar #2019gantipresiden dalam bentuk pernyataan yang keduanya sampaikan, dimana aksi #2019gantipresiden bukan pelanggaran pemilu atau bukan kampanye hitam. Sebagai anggota Bawaslu tidak sepatutnya mereka memiliki sikap keberpihakan terhadap apa yang mereka dukung. Anggota Bawaslu seharusnya bersikap profesional dan memiliki sikap netral dalam menjalankan tugasnya terkait pengawasan jalannya pemilu.

Sumber informasi yang digunakan dalam *frame* berita edisi kali ini merupakan kutipan pernyataan langsung dari kuasa hukum LBH Almisbat Adhel Setiawan terkait laporannya terhadap anggota Bawaslu yang terjerat dugaan pelanggaran etik terkait aksi #2019gantipresiden dan sekaligus pernyataan Rahmat Bagja yang merupakan pembelaannya terkait laporan yang ditujukan kepadanya perihal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan olehnya. Berikut kutipannya:

“Pokok laporan kami adalah pernyataan Fritz Edward dan Rahmat Bagja selaku komisioner Bawaslu yang menyatakan tagar #2019gantipresiden bukan pelanggaran pemilu atau bukan kampanye

hitam,” tutur kuasa hukum LBH Almisbat, Adhel Setiawan, di kantor DKPP, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/9).

Sementara itu, komisioner Bawaslu terlapor, Rahmat Bagja, mengatakan, DKPP memiliki kewenangan untuk menilai laporan yang ditujukan kepadanya. Namun demikian, ia mengaku tak setuju jika disebut berpihak pada salah satu gerakan terkait pemilihan pemilihan presiden 2019.

Pembelaan yang dilakukan oleh Rahmat Bagja sebagai salah satu terlapor seakan memberikan penegasan bahwa beliau tidak setuju dengan dugaan yang dituduhkan terhadapnya terkait pelanggaran etik yang dilakukannya. Dia merasa bahwa sudah memiliki sikap netral dengan tidak berpihak pada salah satu gerakan pemilihan presiden 2019.

Penutup yang digunakan dalam berita kali ini berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad Romli Latif selaku Koordinator Deklarasi. Dalam pernyataannya tersebut, dia memberikan informasi mengenai jumlah ormas yang ikut serta dalam deklarasi aksi #2019gantipresiden yang diadakan di Lampung. Tulisannya seperti berikut:

Koordinator deklarasi, Ahmad Romli Latif, menyatakan setidaknya ada 48 organisasi masyarakat (ormas) di Lampung yang ikut.

Penutup di atas seakan ingin menceritakan bagaimana aksi #2019gantipresiden berjalan sangat baik dan tidak menimbulkan dampak yang negatif seperti apa yang

diberitakan oleh beberapa media lainnya terkait terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Terlihat dari bagaimana banyaknya jumlah ormas yang ikut serta merayakan aksi deklarasi tersebut dan semuanya berjalan dengan tertib.

Skrip dalam *frame* berita kali ini menggunakan unsur *what, who, where* dan *how* untuk memperkuat setiap *frame* dalam sebuah berita yang disampaikan. Dijelaskan dalam berita edisi kali ini terkait adanya dugaan pelanggaran etik terhadap aksi #2019gantipresiden yang dilakukan oleh anggota Komisioner Bawaslu yaitu Fritz Edward dan Rahmat Bagja. Keduanya diduga memihak kepada aksi #2019gantipresiden terlihat bagaimana Rahmat Bagja menyikapi aksi tersebut sebagai aksi yang bukan pelanggaran pemilu atau bukan kampanye hitam, dugaan tersebut ada dalam pernyataan yang disampaikan secara langsung oleh kuasa hukum LBH Almisbat Adhel Setiawan. Adanya kondisi dan situasi yang terjadi terkait diselenggarakannya aksi #2019gantipresiden juga dijelaskan dalam berita kali ini. Dimana di beberapa daerah seperti Surabaya, aksi tersebut mendapatkan penolakan dari beberapa massa yang akhirnya bentrok antar massa pendukung dan masyarakat yang menolak aksi tersebut pun tidak dapat dihindarkan. Penolakan juga terjadi di Pekanbaru, Riau dimana kala itu aktivis perempuan Neno Warisman yang merupakan pendukung dari gerakan aksi #2019gantipresiden mendapatkan intimidasi dari kelompok lainnya. Neno ditolak dan diusir saat ingin menghadiri deklarasi tersebut di Pekanbaru, Riau pada 26 Agustus silam, hal serupa juga dialami Ahmad Dhani yang dikepung di sebuah hotel di Surabaya. Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Lampung saat deklarasi aksi

#2019gantipresiden diselenggarakan di sana, tepatnya di pelataran Bambu Kuning Square (BKS), Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung. Aksi tersebut berjalan dengan baik dan tidak ada penolakan yang berarti seperti di daerah-daerah sebelumnya, aksi tersebut dihadiri oleh musisi Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet dan petinggi partai lainnya. Kesuksesan deklarasi aksi #2019gantipresiden tersebut pun semakin terlihat dari banyaknya ormas yang ikut serta di dalamnya. Dalam hal ini Republika seakan ingin menggambarkan bahwa aksi #2019gantipresiden tidak selalu terkesan berdampak negatif yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya **tematik**, tema yang digunakan dalam *frame* kali ini adalah soal keberpihakan anggota Komisioner Bawaslu terhadap aksi #2019gantipresiden selain itu juga tema soal kondisi dan situasi yang terjadi terkait aksi #2019gantipresiden juga ditonjolkan dalam *frame* berita kali. Dan semuanya itu diperkuat dengan adanya unsur koherensi penjelas dan koherensi pembeda. Berikut kalimatnya:

Menurut Adhel, tokoh-tokoh yang menggerakkan aksi dan tagar tersebut merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam partai politik pendukung calon tertentu.

Sementara itu, dari Lampung dilaporkan, perhelatan deklarasi Gerakan Nasional Prabowo Presiden (GNPP) dengan tagar #2019PrabowoPresiden yang berlangsung di pelataran Bambu Kuning Square (BKS), Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung, Jumat (7/9), berjalan lancar. Deklarasi dihadiri musisi Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, dan petinggi partai lainnya.

Retoris dalam *frame* berita edisi 8 September 2018 kali ini menggunakan unsur leksikon yang menggambarkan perlakuan yang diterima Neno Warisman dan Ahmad Dhani terkait keterlibatannya dalam deklarasi aksi #2019gantipresiden di beberapa daerah. Berikut kalimatnya:

Ekses perang tagar diketahui juga membuat sejumlah aktivis pro #2019gantipresiden mendapat intimidasi dari kelompok lainnya. Aktivitas perempyan Neno Warisman ditolak dan diusir saat ingin menghadiri deklarasi tersebut di Pekanbaru, Riau, 26 Agustus silam. Hal serupa juga dudaoati Ahmad Dhani yang dikepung di sebuah hotel di Surabaya.

Unsur leksikon terlihat dalam penggunaan kata '**ekses**', yang digunakan sebagai penekanan terhadap kalimat selanjutnya, *ekses* berarti sebuah peristiwa yang terjadi dengan intensitas tinggi atau bisa dikatakan melampaui batas. Dalam hal ini perang tagar yang terjadi seakan telah melampaui batas yang akhirnya terjadi intimidasi terhadap para aktivis pro #2019gantipresiden. Akan tetapi melampaui batas yang seperti apa yang dimaksud oleh Republika pada edisi kali tidak dijelaskan lebih mendalam.